BADAN POM

KINERJA BPOM
DALAM ANGKA
TRIWULAN III



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

2025



2025

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN III



SAMBUTAN
KEPALA BPOM RI



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dituangkan dalam buku "Kinerja BPOM Dalam Angka". Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan BPOM maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 153.366 nomor izin edar, pemeriksaan terhadap 21.341 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 40.576 sampel, 177 perkara, dan 174 kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Di tengah dinamika global dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, termasuk isu-isu krusial seperti maraknya peredaran obat ilegal dan pangan yang tidak aman, BPOM semakin memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus-kasus besar seperti peredaran obat-obatan yang mengandung zat berbahaya dan skandal impor pangan ilegal menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat. Dengan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BPOM berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. BPOM juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 27 November 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
HIGHLIGHT 1
BAB 1 Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan 5
BAB 2 Penindakan di Bidang Obat dan Makanan 11
BAB 3 Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman 16
BAB 4 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 20
BAB 5 Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan 22
BAB 6 Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat 25
BAB 7 Digitalisasi Pelayanan Publik 37
BAB 8 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan 42
BAB 9 Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 47
BAB 10 Kerjasama Internasional 55
BAB 11 Sumber Daya Manusia 62
BAB 12 Realisasi Anggaran 64
Penutup 66
Lampiran 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan....5
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan....5
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan....6
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan....6
Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan....8
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan....8
Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan....9
Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan....11
Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan....12
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan....13
Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia....14
Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi BPOM....25
Gambar 13. Jumlah Pelayanan Informasi kepada Media....25
Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan....26
Gambar 15. Sebaran Media Pemberitaan Isu Obat dan Makanan....27
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial BPOM Berdasarkan Platform....28
Gambar 17. Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform....29
Gambar 18. Engagement Per Platform....29
Gambar 19. Top Engagement Content terkait BPOM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube....30
Gambar 20. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan....31
Gambar 21. Jumlah Permintaan Informasi Publik....32
Gambar 22.Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan BPOM Berdasarkan Profesi....33
Gambar 23. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan BPOM....34
Gambar 24. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh BPOM Berdasarkan Komoditi....34
Gambar 25. Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada BPOM....35
Gambar 26. Layanan Advokasi Hukum BPOM....45
Gambar 27. Layanan Penanganan Perkara BPOM....45
Gambar 28. Pelaksanaan Entry Meeting PEKPPP BPOM....50
Gambar 29. Pelaksanaan Exit Meeting PEKPPP BPOM....51
Gambar 30. Berita Acara pada Aplikasi Evorta....51
Gambar 31. Pelaksanaan Sosialisasi menggunakan Aplikasi Evortala....52
Gambar 31. Surat Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi (KOIN) Pelayanan Publik 53
Gambar 32. Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama Antara Kemenkes - Kemhan - BPOM yang Diselenggarakan di Jakarta....55

DAFTAR GAMBAR

GGambar 33. Kunjungan Kerja untuk Memperkuat Diplomasi yang Diselenggarakan di Canberra, Australia 56
Gambar 34. Kepala BPOM menjadi pembicara di perkuliahan tamu yang Diselenggarakan di University of New South Wales (UNSW) 57
Gambar 35. Kepala BPOM melakukan kunjungan ke Laboratorium Riset BioNyeri 57
Gambar 36. BPOM mengadakan pertemuan dengan Assistant Director-General for Access to Medicines and Health Products WHO 58
Gambar 37. Kepala BPOM menghadiri The 16th Conference of the International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) 59
Gambar 38. Kepala BPOM Menandatangani Kerja Sama dengan Badan Karantina Indonesia 60
Gambar 39. Proporsi Pegawai BPOM Berdasarkan Gender 62
Gambar 40. Sebaran Pegawai BPOM Berdasarkan Penempatan 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan 7
Tabel 2. Profil Laporan Efek Samping 9
Tabel 3. Daftar Aplikasi Internal BPOM yang Sudah Lulus *Vunerability Assessment* 40
Tabel 4. Realisasi Anggaran 64

HIGHLIGHT

BPOM Ajak Industri dan UMKM Wujudkan Keamanan Pangan Lewat Layanan Terpadu



Jakarta - BPOM menggandeng Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) untuk menggelar kegiatan Gebyar Layanan Publik Terpadu Pangan Olahan pada 24—25 Juli 2025. Kegiatan selama 2 hari ini menjadi ajang sinergi antara regulator dan pelaku usaha bidang pangan olahan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam mendorong keamanan dan legalitas produk pangan olahan di Indonesia. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan secara resmi, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa keamanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab regulator, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara industri, pemerintah, dan masyarakat.

BPOM Jalani *On Site Visit Evaluation* sebagai Tahap Akhir Menuju WLA



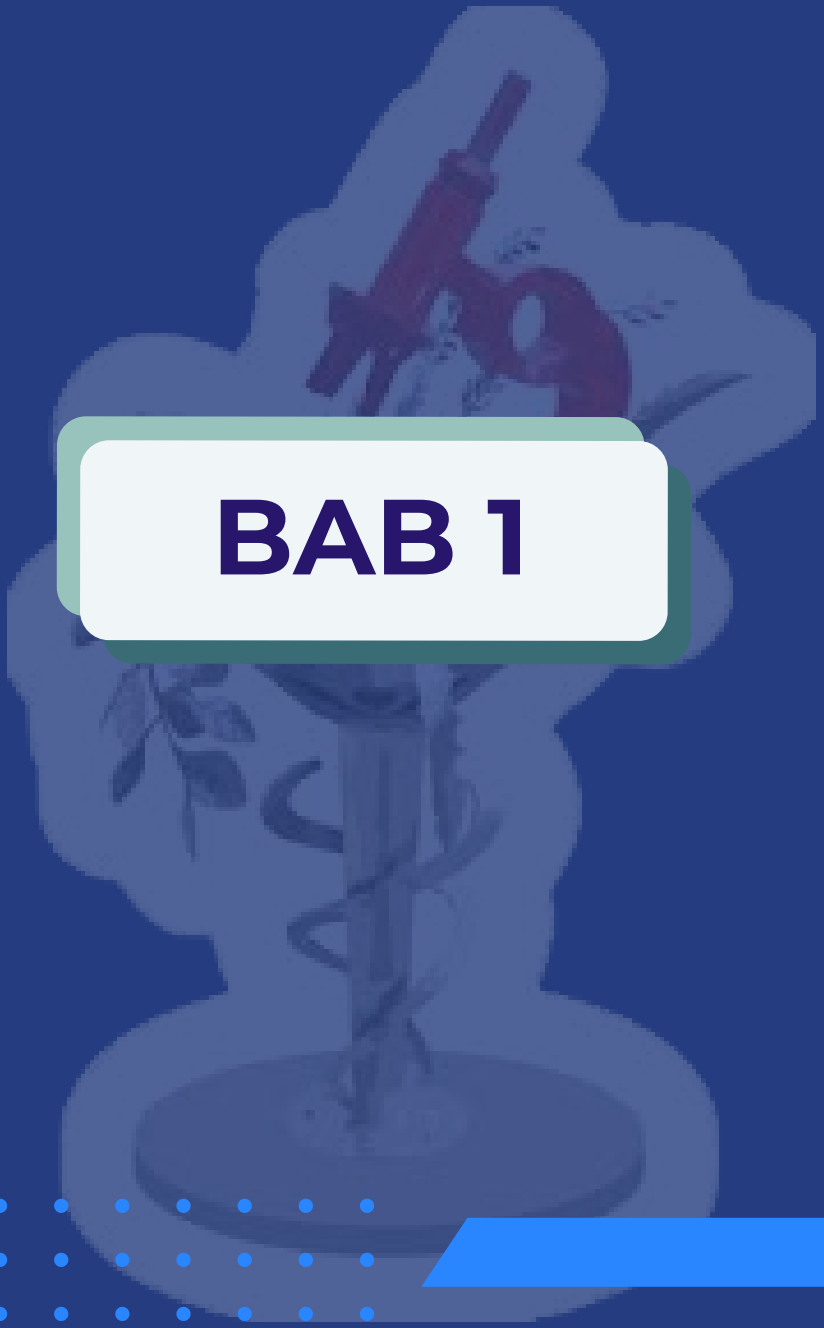
Jakarta, Denpasar – BPOM memasuki tahap akhir proses evaluasi dari *World Health Organization* (WHO) dalam upayanya untuk memperoleh status sebagai WHO *Listed Authority* (WLA). Mulai tanggal 7—13 Agustus 2025, BPOM akan menjalani *onsite performance evaluation* (PE) *tools evaluation* oleh tim *assessor* dan *observer* WHO. Rabu (6/8/2025), telah dilaksanakan *kick off meeting* yang menandai dimulainya tahap evaluasi PE ini.

Kick off meeting diselenggarakan secara paralel dari 2 lokasi, yaitu Jakarta dan Denpasar. Kepala BPOM Taruna Ikrar hadir dalam momen pembukaan di Jakarta untuk menyambut secara langsung kehadiran delegasi WHO. Kehadiran Kepala BPOM secara langsung menunjukkan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan evaluasi yang menjadi tahap penting dalam perjalanan BPOM menuju WLA.

Kepala BPOM Tinjau SPPG di Denpasar, Tekankan Pentingnya Keamanan Pangan Dalam Program MBG



Denpasar — Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari di Kota Denpasar, Bali pada Rabu (24/9/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional. Dalam keterangannya, Taruna Ikrar mengatakan bahwa dalam program ini BPOM berperan dalam melakukan mitigasi terhadap potensi masalah keamanan pangan yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat program MBG. BPOM melakukan upaya preventif antara lain berupa pelatihan personil kunci di SPPG dan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Badan Gizi Nasional.



BAB 1

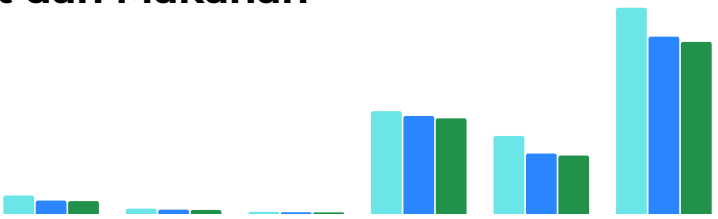
BAB 1

Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

PENGAWASAN *PRE-MARKET*

Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, telah diterbitkan 158.066 keputusan dan 153.366 persetujuan izin edar dari 183.862 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
permohonan	16.367	4.650	1.785	91.593	69.467	183.862
Keputusan yang diterbitkan	11.828	3.748	1.422	87.289	53.779	158.066
Persetujuan	11.382	3.471	1.337	85.164	52.012	153.366

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, dari 2.713 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 2.664 (98,19%) iklan.



	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Total
Permohonan	1.901	405	407	2.713
Keputusan yang disetujui	1.953	346	365	2.664

Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

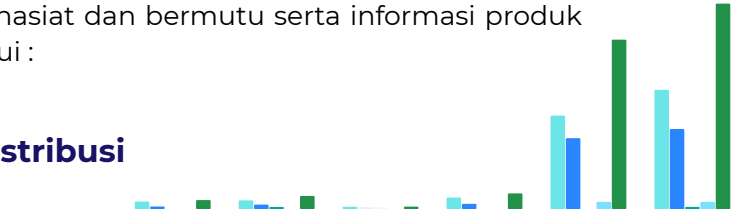
PENGAWASAN *POST-MARKET*

Pengawasan post-market dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

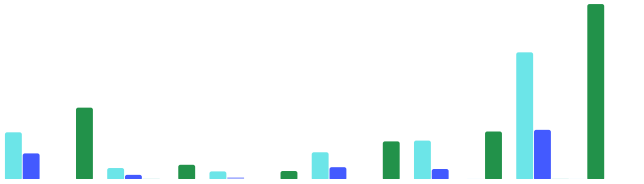
Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah diperiksa sebanyak 3.635 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 1.405 (38,65%) sarana adalah TMK.



	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
MK	114	136	22	186	1.643	2.101
TMK	27	60	2	74	1.242	1.405
Tutup	0	19	1	0	0	20
Tidak Dapat Dinilai	0	0	0	0	109	109
Total	141	215	25	260	2.994	3.635

Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah diperiksa sebanyak 17.706 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 4.907 (27,71%) sarana adalah TMK.



	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
MK	4.656	1.021	678	2.625	3.813	12.793
TMK	2.510	327	40	1.107	923	4.907
Tutup	0	4	0	0	0	4
Tidak Dapat Dinilai	0	0	0	0	2	2
Total	7.166	1.352	718	3.732	4.738	17.706

Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah sampel yang diuji	Hasil Uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE / Ilegal / Palsu	Kadaluarsa	Rusak				MS	TMS			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	*Targeted*	10.164	5	0	3	246	10.156	8.180	7.927	253	261	1.976	8.188
Obat bahan alam	*Targeted*	7.207	119	1	7	1.249	7.080	6.047	4.365	1.682	1.809	1.033	6.174
Obat kuasi	*Targeted*	529	2	0	0	76	527	451	366	85	87	76	453
Suplemen Kesehatan	*Targeted*	2.039	11	0	0	178	2.028	1.745	1.482	263	274	283	1.756
Kosmetik	*Targeted*	14.844	17	0	5	2.459	14.882	12.039	9.470	2.569	2.5910	2.783	12.061
Rokok	*Targeted*	126	0	0	0	0	126	22	18	4	4	104	22
Pangan	*Targeted*	15.658	9	0	9	1.500	15.640	11.904	10.563	1.341	1.359	3.736	11.922

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, dari 50.567 sampel yang disampling terdapat 40.576 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana terdapat 6.385 (15,74%) sampel tidak memenuhi syarat.

Sertifikasi

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah diterbitkan 90.492 SKI, 27.716 SKE, 5.047 SAS. Belum terdapat Uji Klinik dan AHP yang diterbitkan sampai dengan triwulan III tahun 2025.

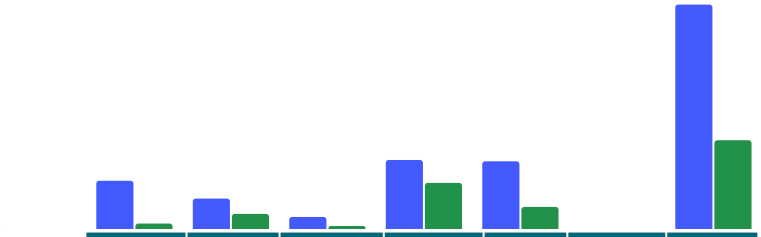


	Obat	NPP	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
SKI	18.985	0	4.448	2.499	21.284	43.276	90.492
SKE	602	0	190	186	281	26.457	27.716
SAS	3.694	0	233	299	98	723	5.047
Uji Klinik	0	0	0	0	0	0	0
AHP	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/ brosur. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, dari 33.579 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 9.483 (28,24%) iklan tidak memenuhi ketentuan.

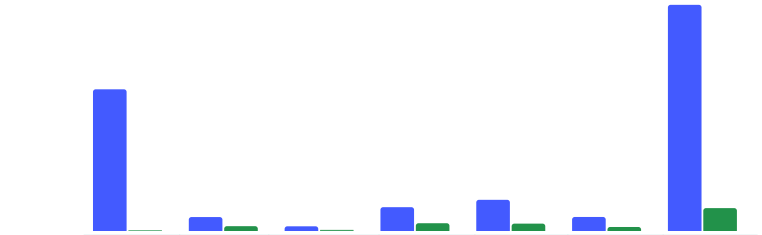


	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Rokok	Total
MK	5.117	3.196	1.217	7.355	7.211	0	24.096
TMK	506	1.549	241	4.887	2.300	0	9.483

Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Pengawasan Label

BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan label yang telah memperoleh persetujuan BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, dari 99.679 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 8.949 (8,98%) label tidak memenuhi ketentuan.



	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Rokok	Total
MK	56.744	5.353	1.630	9.326	12.287	5.390	90.730
TMK	129	1.684	196	2.870	2.711	1.359	8.949

Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

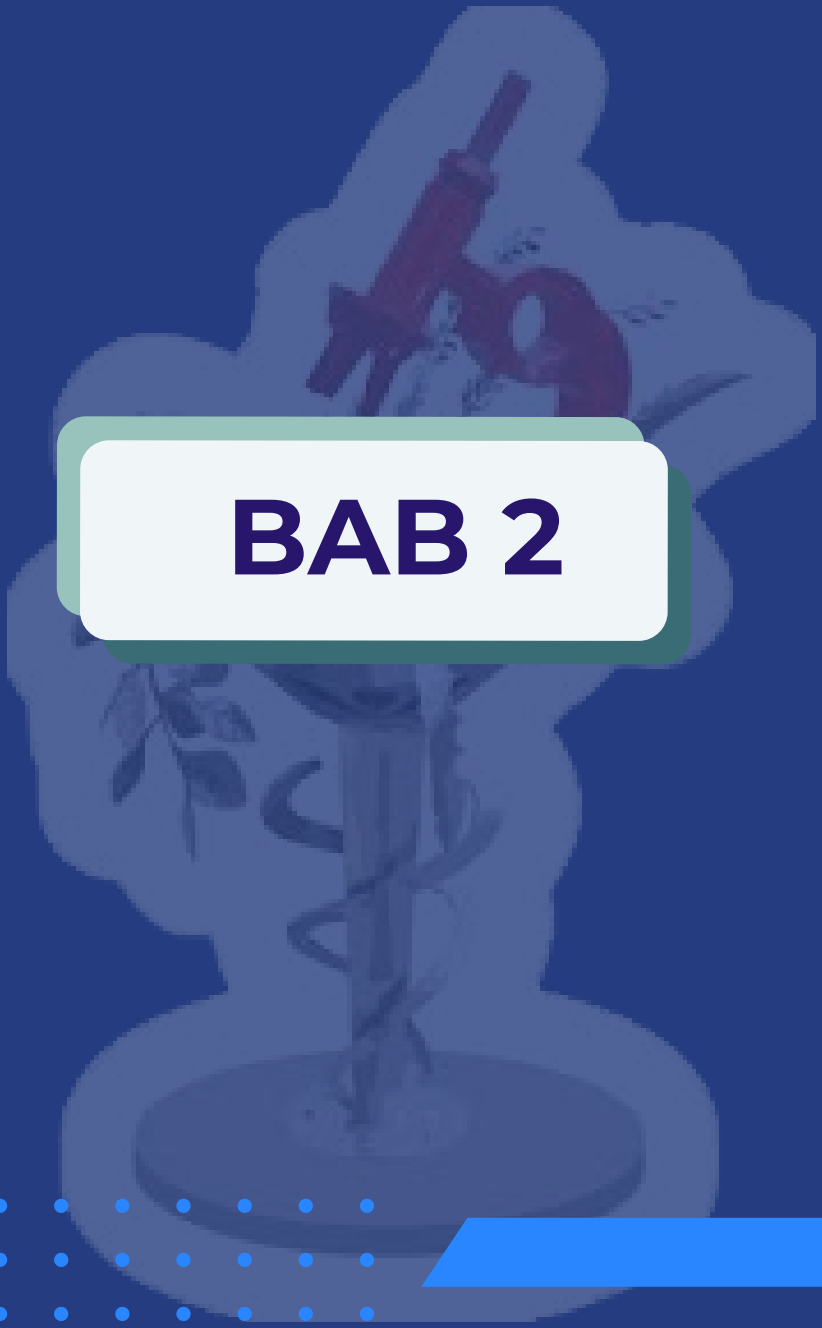
Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmokologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

Tabel 2. Profil Laporan Efek Samping

	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut	%
Obat	11.754	8.637	73,48
Obat bahan alam	89	89	100,00
Suplemen Kesehatan	61	61	100,00
Kosmetik	778	735	94,47



BAB 2

BAB 2

Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

1. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, BPOM menyusun aplikasi peta kerawanan kejahatan, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

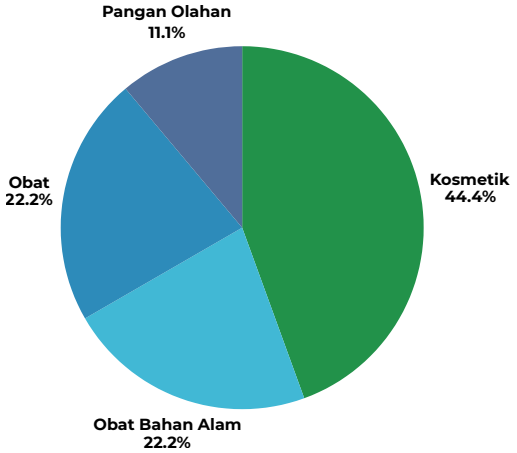


Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 5.899 kasus yang terdiri dari 2.697 kasus terkait obat, 72 kasus terkait kuasi, 877 kasus terkait obat bahan alam, 151 kasus suplemen kesehatan, 1.499 kasus terkait kosmetik dan 557 kasus terkait komoditi pangan olahan.

2. Hasil Kegiatan dan Operasi Intelijen

Peran BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan mayarakat Indonesia. Salah satu upaya BPOM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik di *pre-market* maupun *post-market*. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagi daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi maupun pro justisia.

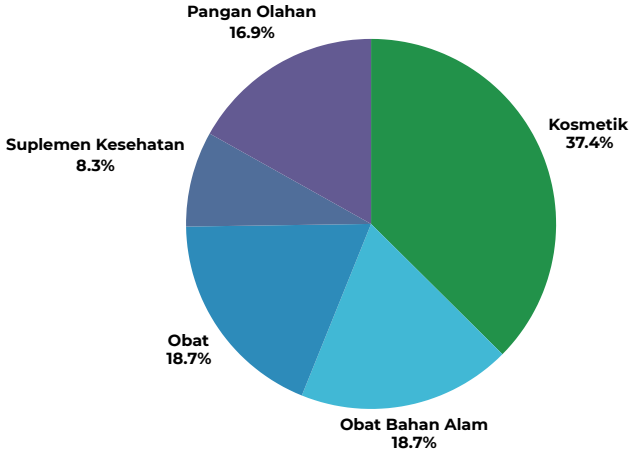


Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan s.d. Triwulan III Tahun 2025

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, telah disusun 236 laporan informasi dari pelaksanaan kegiatan intelijen dan 12 laporan intelijen dari pelaksanaan operasi intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 9 rekomendasi intelijen dengan 2 rekomendasi terkait kasus peredaran obat ilegal, 2 rekomendasi terkait kasus obat bahan alam ilegal, 4 rekomendasi kasus kosmetik ilegal serta 1 rekomendasi kasus pangan olahan ilegal yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, BPOM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk obat dan makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



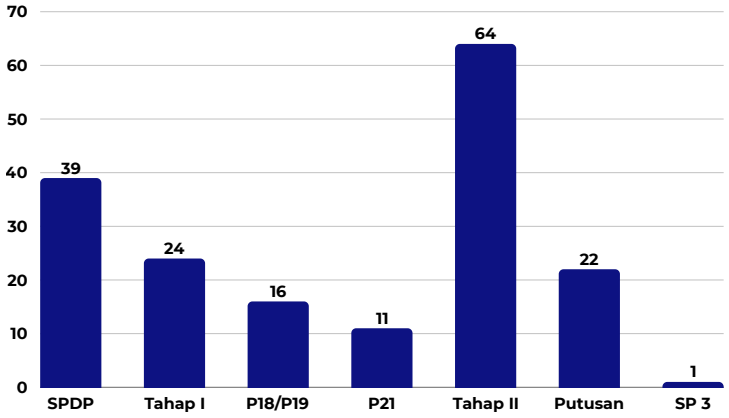
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III tahun 2025, ditemukan sebanyak 154.562 *link* yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

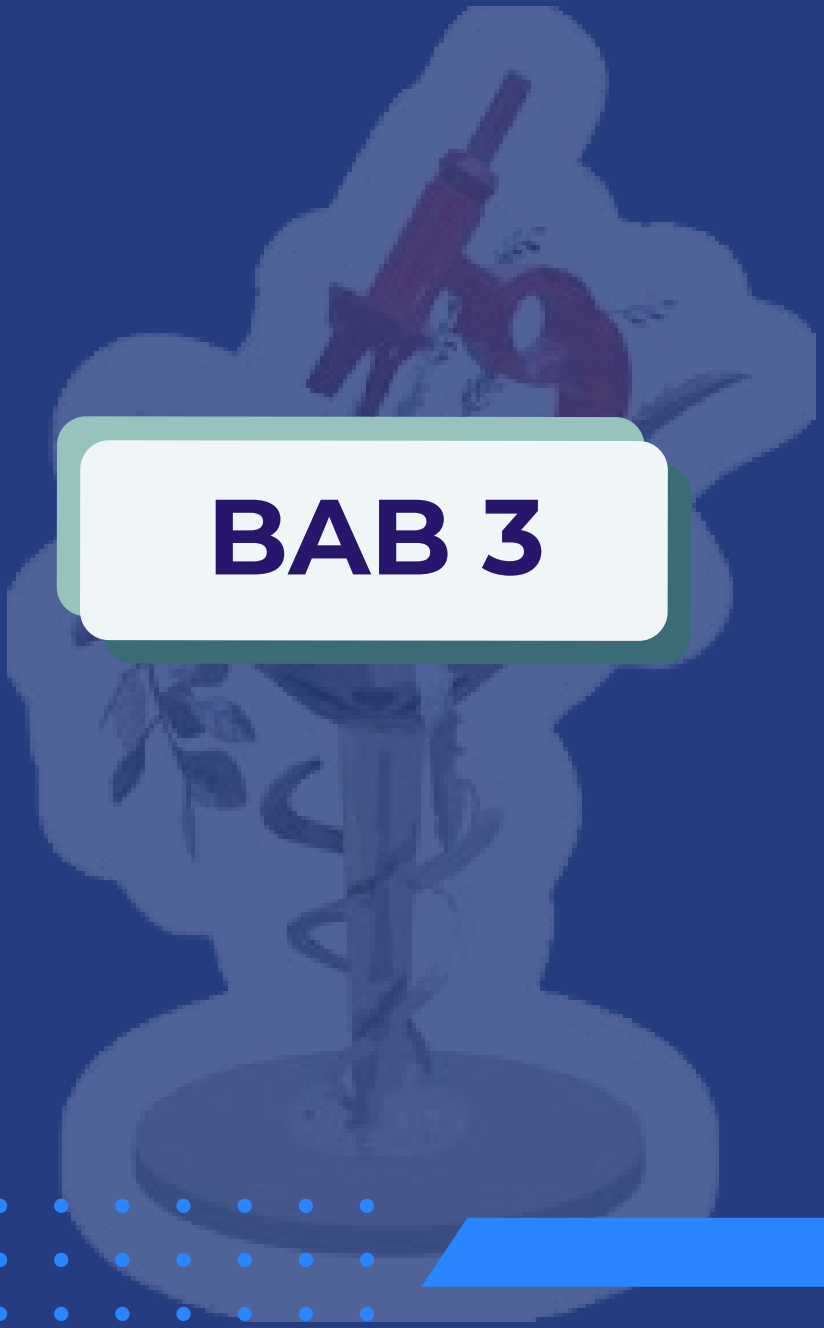
4. Hasil Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, BPOM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM telah menindaklanjuti 177 perkara. Sebanyak 39 perkara masih dalam tahap SPDP, 24 perkara pada tahap I, 16 perkara pada tahap P18/19, 11 perkara pada tahap P21/P21A, 64 perkara pada tahap II, 22 perkara telah mendapatkan putusan oleh pengadilan dan 1 perkara sudah di SP3.



Gambar 11. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan III Tahun 2025



BAB 3

BAB 3

Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun peraturan/standar/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Obat

Pada tahun 2025, terdapat 8 peraturan/standar/pedoman terkait obat yang disusun oleh BPOM. Daftar 8 peraturan/standar/pedoman terkait obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Produk Biosimilar (45%).
2. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Registrasi Obat (45%).
3. Revisi Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans (45%).
4. Revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat (65%).
5. Revisi Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (65%).
6. Peraturan BPOM Tentang Standar Cara Pembuatan yang Baik untuk Eksipien yang digunakan dalam Pembuatan Obat (65%).
7. Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Rekognisi Laboratorium Eksternal Pengujian Obat dan Bahan Obat (100%).
8. Pedoman Verifikasi Pengujian Mikrobiologi Obat dan Bahan Obat (45%).

Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 7 peraturan/standar/pedoman terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun oleh BPOM pada tahun 2025. Daftar 7 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam (70%).
2. Revisi Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam (95%).
3. Revisi Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2022 dan Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (80%).
4. Revisi Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Registrasi Obat Kuasi (80%).
5. Revisi Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik (40%).
6. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Makanan melalui Peran Serta Masyarakat (100%).
7. Revisi Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia (90%).

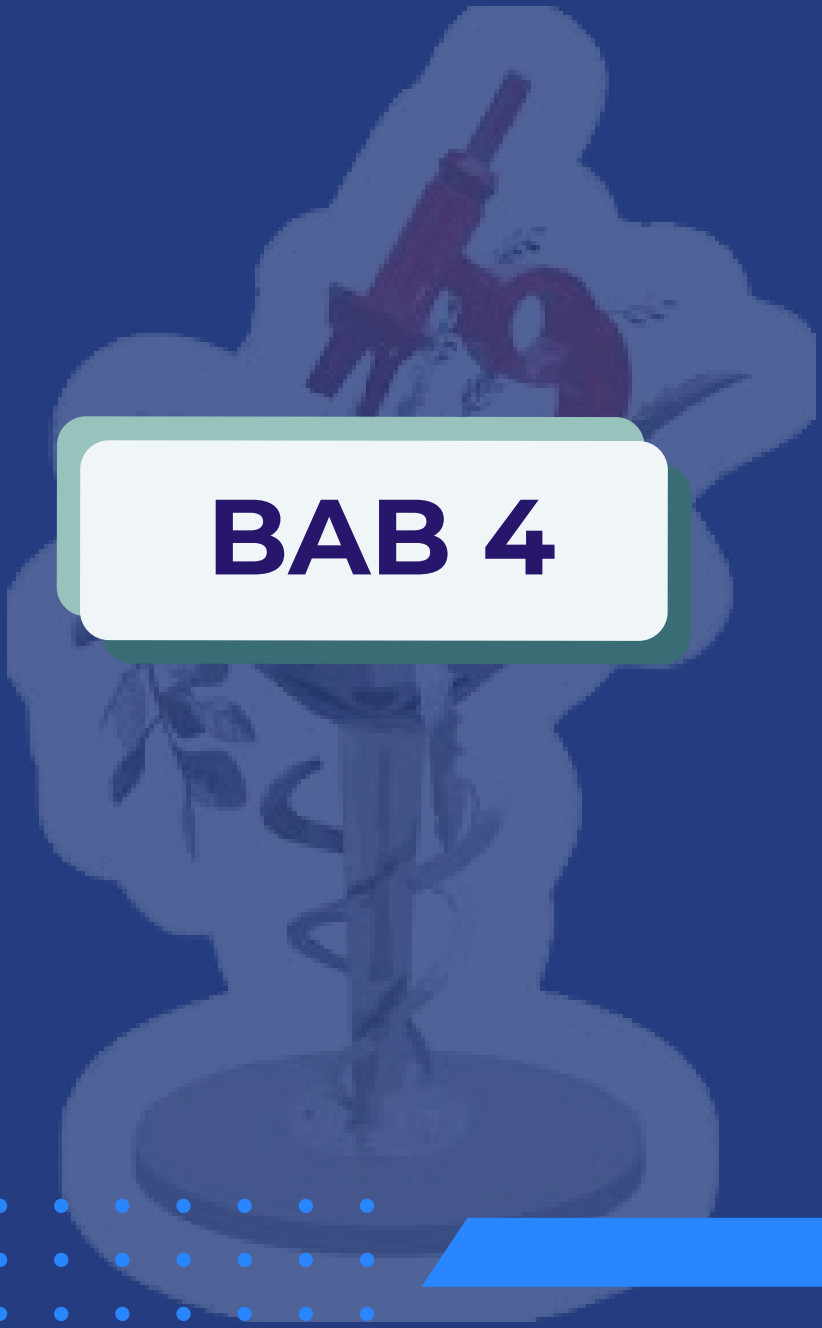
Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah diselesaikan 160 kajian dengan seluruh kajian diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja).

Pangan

Terdapat 6 peraturan/standar/pedoman terkait pangan olahan yang disusun oleh BPOM pada tahun 2025. Daftar 6 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan BPOM 2025: Revisi Lampiran Peraturan Cemaran (70%).
2. Revisi Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus - Kelompok Dewasa (100%).
3. Revisi Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (100%).
4. Revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (100%).
5. Keputusan Kepala BPOM tentang Informasi Nilai Gizi Usaha Mikro dan Kecil (78%).
6. Pedoman Pengelolaan Air Hujan sebagai Bahan Baku Air Minum/Pedoman Persyaratan Mutu dan Keamanan Air Hujan sebagai Bahan Baku Air Minum (70%).

BPOM juga menyusun rekomendasi kebijakan terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah diselesaikan 181 rekomendasi kebijakan dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu.



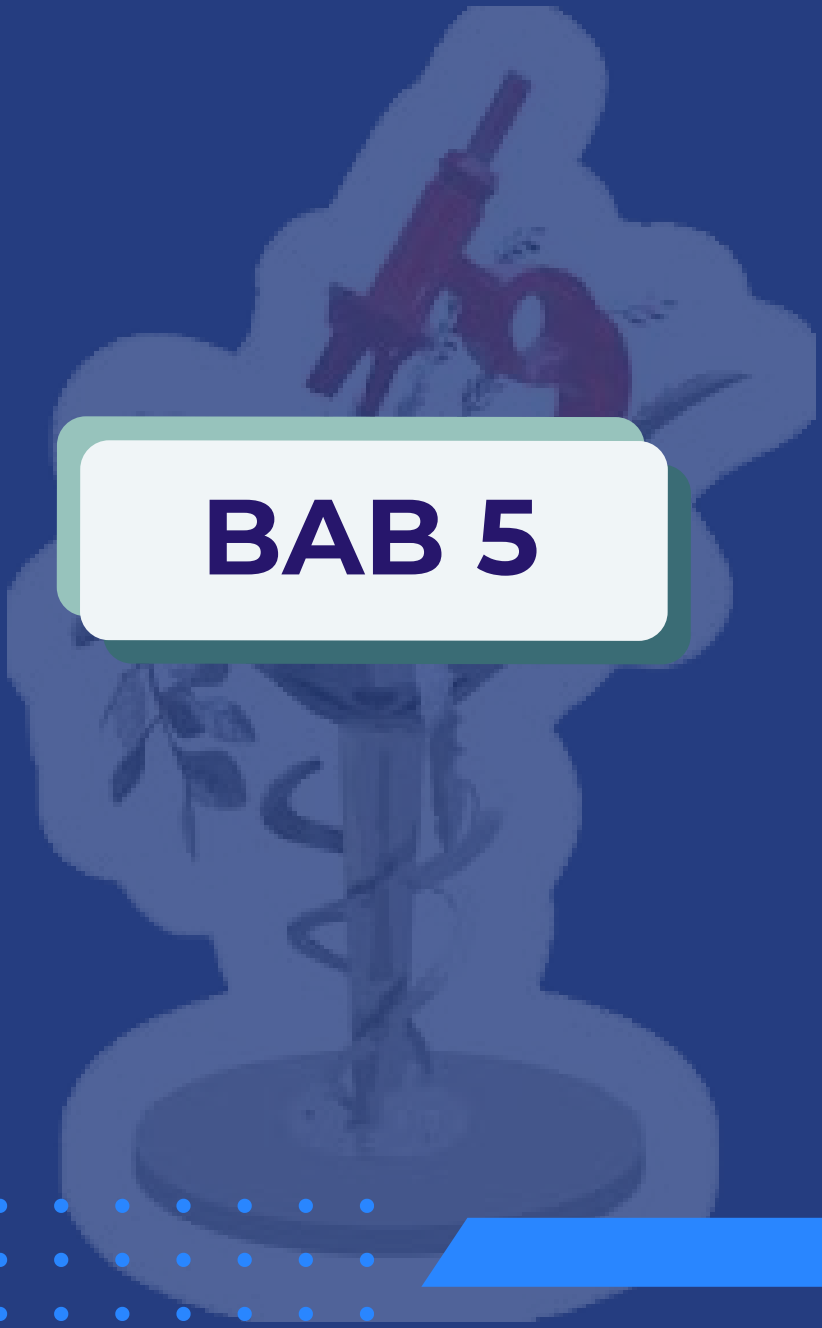
BAB 4

BAB 4

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2025 terdapat 5 topik riset dan kajian yang dilaksanakan oleh BPOM. Daftar riset dan kajian beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling Tahun 2025 (73%).
2. Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC Tahun 2025 (70%).
3. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2025 (70%).
4. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Tahun 2025 (72%).
5. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 (77%).



BAB 5

BAB 5

Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

a. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium

BPOM terus mendorong peningkatan kualitas laboratorium melalui pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). SKL adalah standar yang ditetapkan BPOM sebagai acuan penilaian atau pengukuran kemampuan laboratorium BPOM dalam pelaksanaan pengujian, pengembangan pengujian, pengembangan baku pembanding dan standar kompetensi.

Hingga triwulan III tahun 2025, tingkat pemenuhan SKL mencapai 68,97%. Capaian ini merupakan agregat dari seluruh laboratorium yang ada di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan SKL antara lain penyusunan tools penilaian SKL, monev pemenuhan SKL, dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi pengujian kimia dan mikrobiologi.

b. Metode Analisis yang Dikembangkan

BPOM terus mengembangkan metode analisis Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan terkini. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah dikembangkan 80 metode analisis.

c. Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan baku pembanding dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah dikembangkan 52 baku pembanding.

d. Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

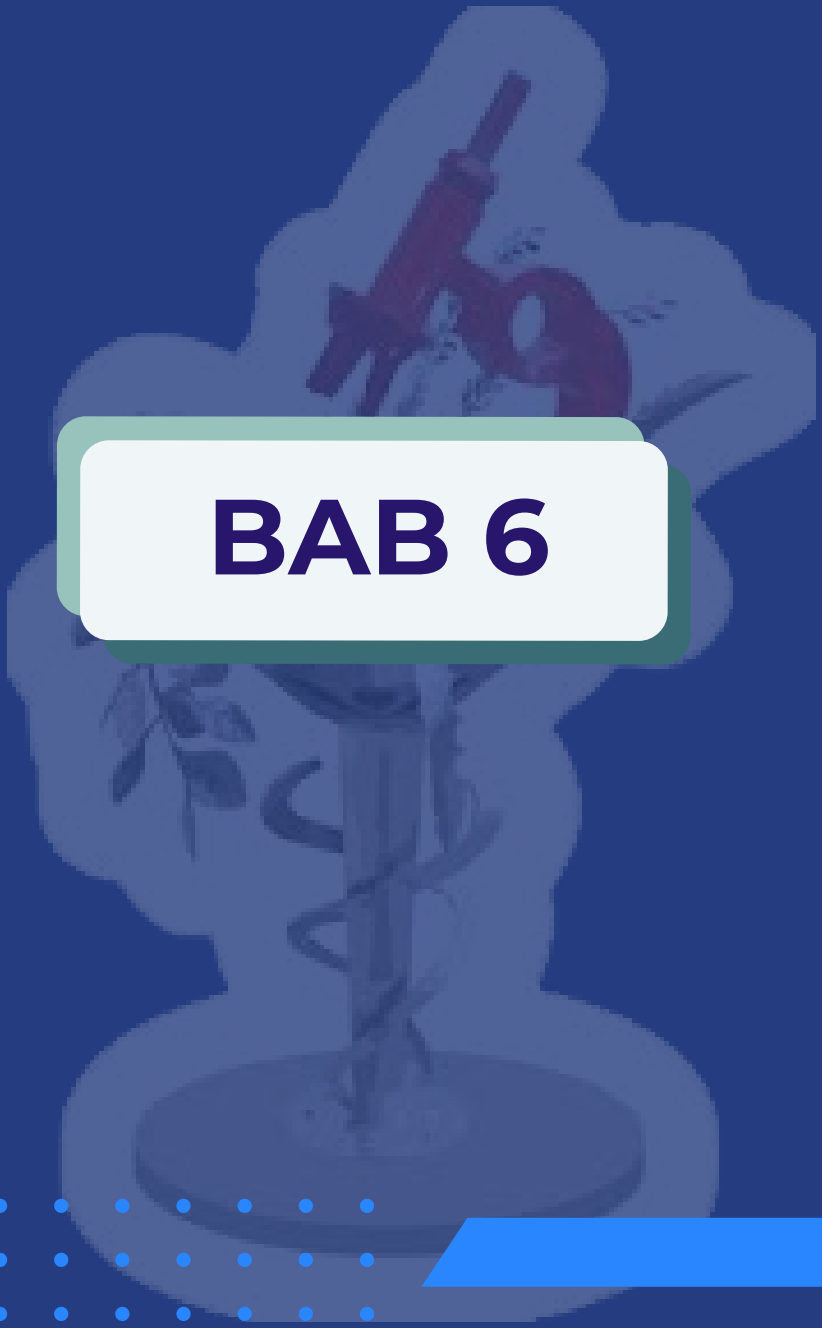
BPOM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel lot release vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat 315 sampel yang telah selesai uji dan memenuhi ketentuan timeline.

e. Alat Pengujian Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, telah dilakukan kalibrasi terhadap 1.438 peralatan laboratorium Obat dan Makanan.

f. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, sharing informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/keahlian. Pada tahun 2025, BPOM menargetkan partisipasi dalam 42 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, BPOM telah berpartisipasi dalam 30 jejaring laboratorium.

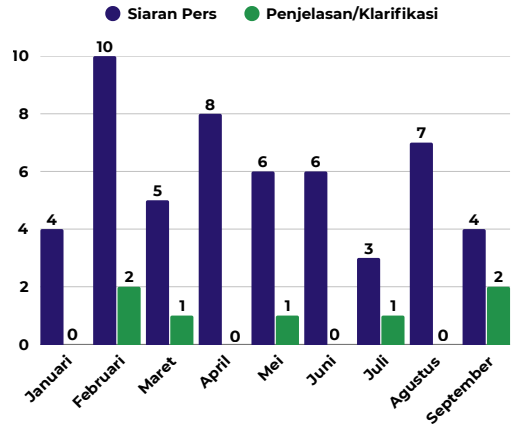


BAB 6

BAB 6

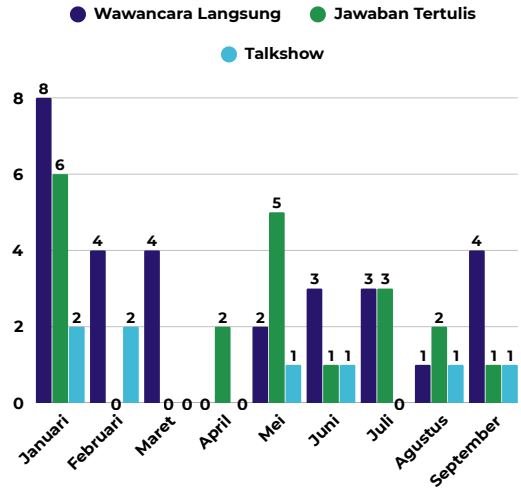
Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, BPOM telah menerbitkan 53 siaran pers dan 7 penjelasan/klarifikasi terkait isu Obat dan Makanan. Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas antara lain obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi dipublikasikan melalui website dan media sosial BPOM.



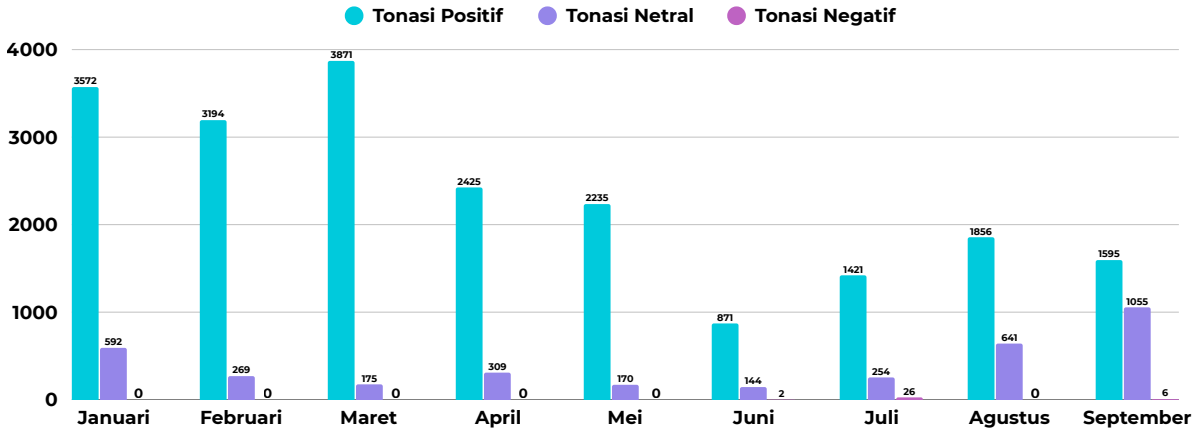
Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi BPOM s.d. Triwulan III Tahun 2025

BPOM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara, talkshow dan pemberian jawaban tertulis. Sampai dengan triwulan III tahun 2025, BPOM menerima 65 permohonan wawancara dari media. Sebanyak 57 permohonan sudah ditindaklanjuti dengan rincian 37 wawancara langsung dan 20 jawaban tertulis.



Gambar 13. Jumlah Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan III tahun 2025

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat 24.684 pemberitaan terkait BPOM maupun Obat dan Makanan secara umum. Dari seluruh pemberitaan tersebut, sejumlah 21.040 (85,24%) berita bertonasi positif, disusul 3.610 (14,62%) berita) bertonasi netral, dan 34 (0,14%) bertonasi negatif. Tonasi positif muncul dari berbagai pemberitaan kegiatan BPOM serta banyaknya pernyataan BPOM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip BPOM.

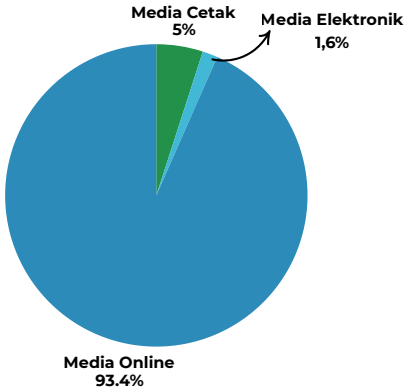


Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2025

Pada bulan Juli, BPOM menandatangani MoU bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan untuk mengoptimalkan sektor farmasi dan kesehatan nasional, termasuk pembangunan rumah sakit di daerah rawan konflik seperti Papua. Selanjutnya pada bulan Agustus, BPOM mengumumkan hasil pengawasan triwulan kedua berupa temuan 34 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, sebagian besar berasal dari skema kontrak produksi.

Pada bulan September, BPOM menanggapi temuan etilen oksida pada salah satu produk mie instan yang beredar di Taiwan. BPOM memastikan produk tersebut bukan berasal dari jalur ekspor resmi dan tetap aman dikonsumsi di Indonesia, serta mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip Cek KLIK dalam memilih produk.

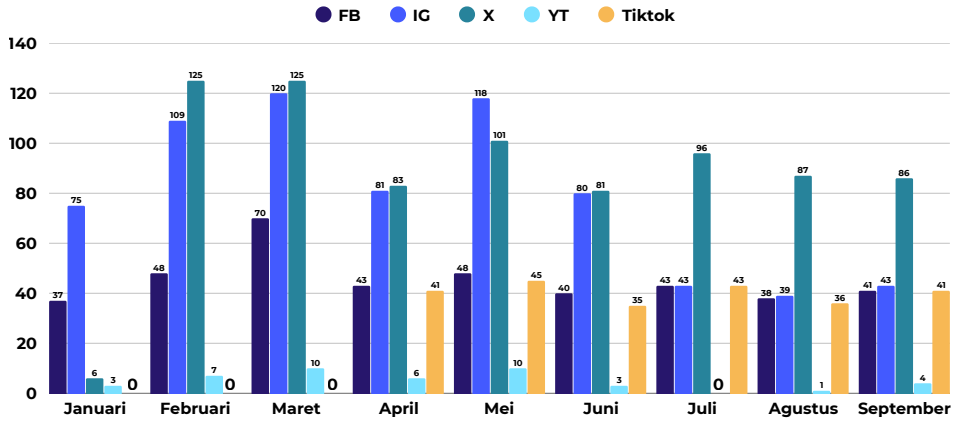
Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Obat dan Makanan serta BPOM hampir seluruhnya berasal dari media *online* sebesar 23.057 (93,41%) berita, media cetak sebesar 1.229 (4,98%) berita dan media elektronik 398 (1,61%) berita.



Gambar 15. Sebaran Media Pemberitaan Isu Obat dan Makanan
s.d. Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan III 2025, aktivitas media sosial BPOM pada 5 *platform* media sosial yaitu Facebook, Instagram, X atau Twitter, Youtube dan Tiktok memiliki rata-rata 1-2 unggahan per hari. Dari seluruh *platform* tersebut, X menjadi kanal paling aktif dengan 269 unggahan, disusul Instagram dengan 125 unggahan, Facebook sebanyak 122 unggahan, TikTok sebanyak 120 unggahan, serta YouTube sebanyak 5 unggahan. Tingginya jumlah unggahan di *platform* X dipengaruhi oleh karakteristik teknis *platform* yang membatasi jumlah karakter per unggahan, sehingga satu konten kegiatan sering terbagi menjadi beberapa *tweet*.

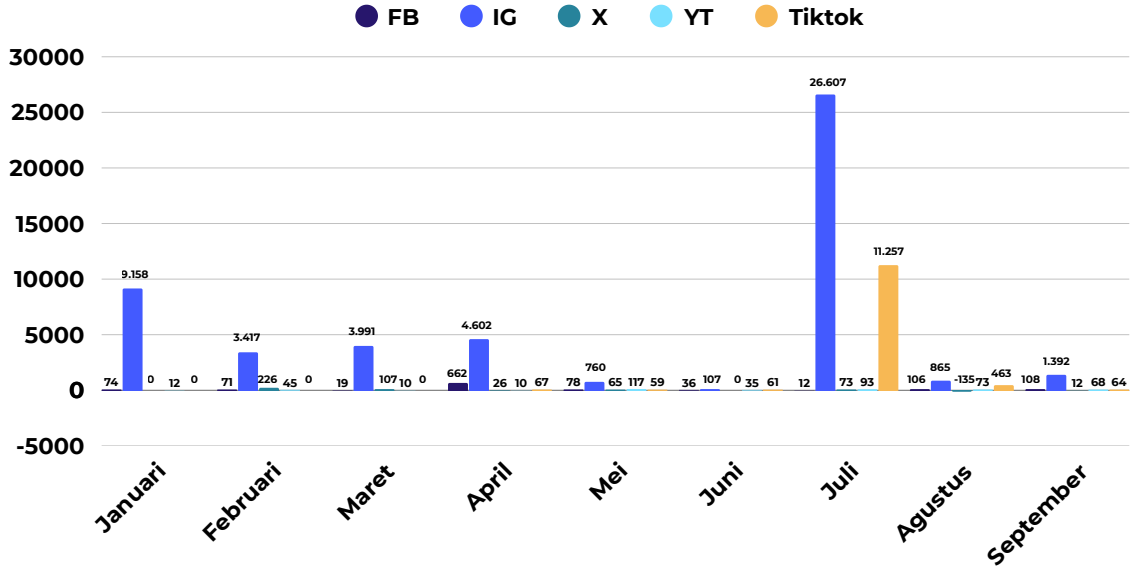
Secara garis besar, total unggahan selama triwulan III pada berbagai *platform* adalah 2.191 konten, dengan rincian unggahan di masing-masing *platform* sebagai berikut:



Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial BPOM Berdasarkan *Platform* s.d Triwulan III Tahun 2025

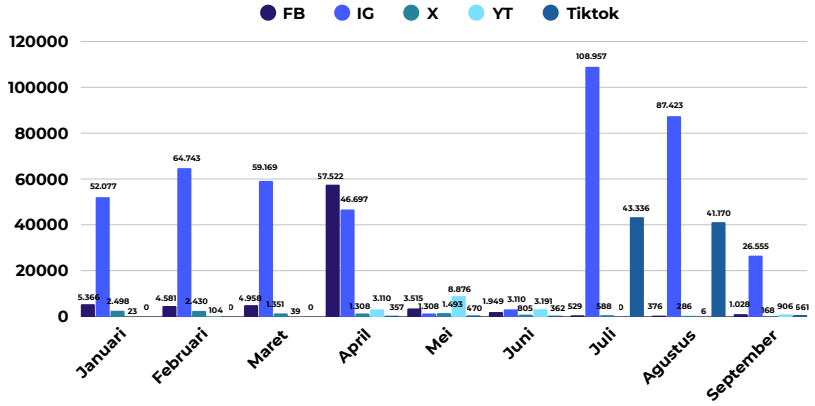
Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung pada triwulan III menunjukkan tren yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Instagram merupakan *platform* dengan pertumbuhan audiens tertinggi pada triwulan III dengan penambahan 28.864 audiens, diikuti oleh TikTok dengan penambahan 11.784 audiens, YouTube dengan penambahan 234 audiens, dan Facebook dengan penambahan 226 audiens. Sementara itu, *platform* X mengalami sedikit penurunan dengan berkurangnya 50 audiens.

Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada bulan Juli dipicu oleh publikasi konten yang menggandeng *influencer* ternama, sementara penurunan pertumbuhan pada bulan Agustus dan September dipengaruhi oleh dominasi konten berupa liputan kegiatan internal BPOM yang cenderung kurang relevan dengan minat dan kebutuhan audiens.



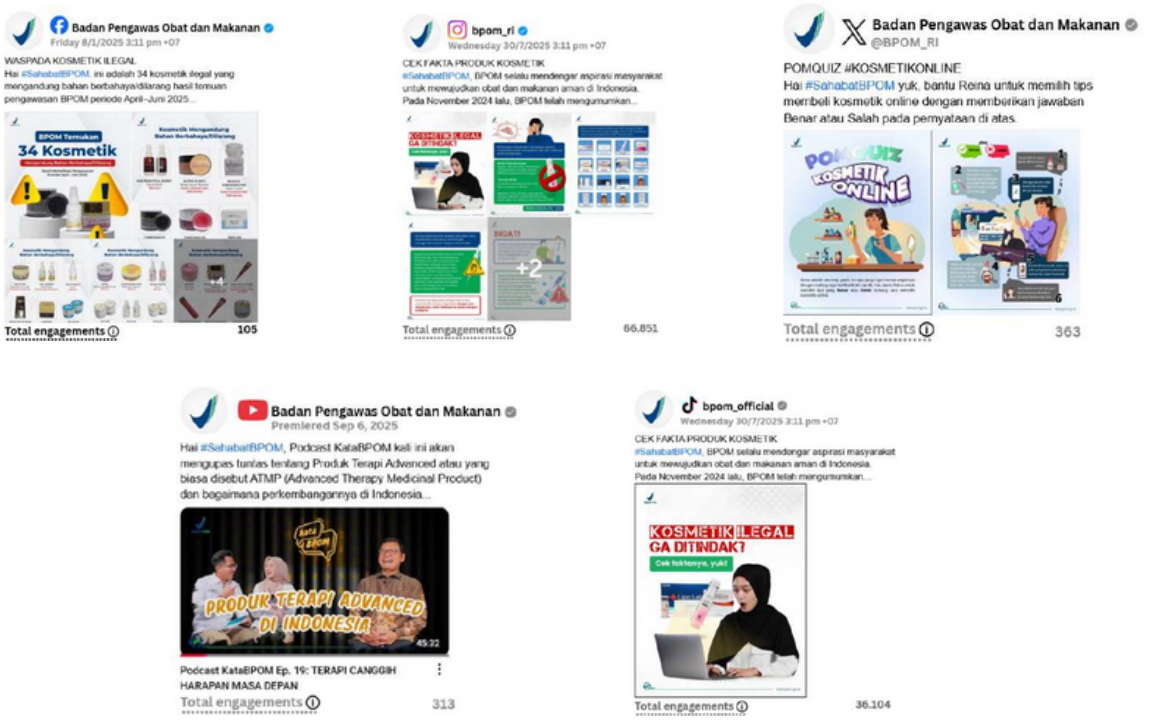
Gambar 17. Pertumbuhan Audiens Berdasarkan *Platform* s.d Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan III, total *engagement* mencapai 311.989 interaksi. Puncak *engagement* terjadi pada bulan Juli dengan 153.410 interaksi, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan September yaitu 29.318 interaksi. Tingginya capaian pada bulan Juli dipengaruhi oleh sejumlah konten yang berhasil menarik perhatian publik, terutama publikasi mengenai penindakan. Pertumbuhan jumlah *engagement* sampai dengan triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 18. *Engagement* Per *Platform* s.d Triwulan III Tahun 2025

Top engagement content terkait BPOM pada kelima *platform* selama triwulan III dapat dilihat pada gambar berikut:



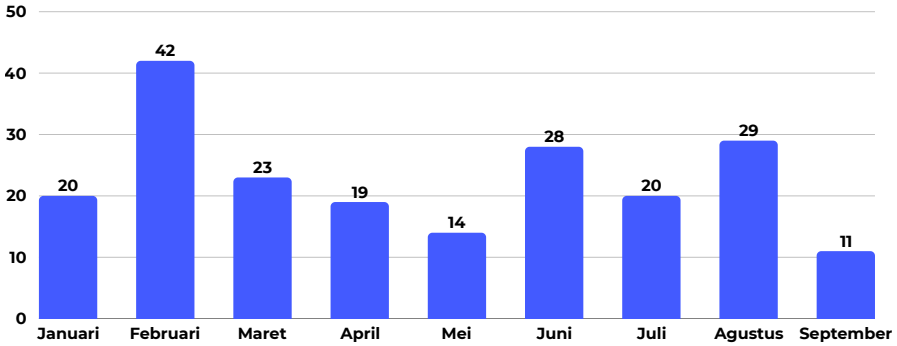
Gambar 19. *Top Engagement Content* terkait BPOM pada *Platform* Facebook, Instagram, X, Youtube dan TikTok s.d Triwulan III Tahun 2025

Dalam rangka memperkuat edukasi dan literasi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, BPOM telah melaksanakan 174 kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) selama triwulan III 2025 dalam bentuk pameran dan penayangan materi KIE melalui e-kiosk, *whatsapp blast*, media sosial, video edukasi, dan *subsite* ULPK BPOM.



Gambar 20. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan III Tahun 2025

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPOM telah menerima 206 permintaan informasi publik dari pemohon informasi publik dengan profesi pelajar/mahasiswa (79,13%), PNS/TNI/POLRI (10,68%), karyawan (3,88%), masyarakat umum lainnya (2,43%), wartawan (1,46%), apoteker (0,97%), pelaku usaha (0,97%), dan sarjana hukum (0,48%).

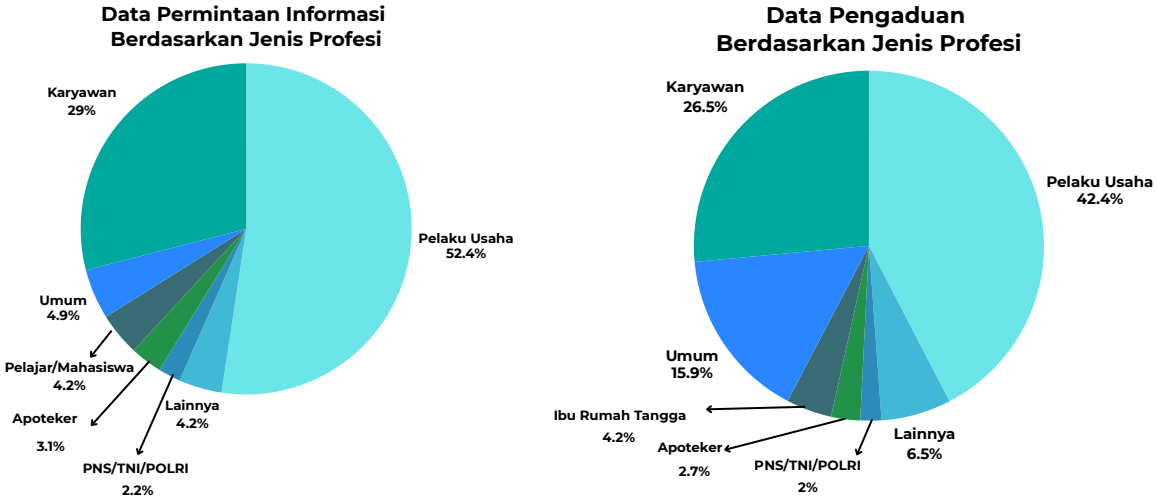


Gambar 21. Jumlah Permintaan Informasi Publik s.d. Triwulan III Tahun 2025

Dari 206 permintaan informasi publik yang diterima oleh BPOM, sebanyak 183 (88,83%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 14 (6,80%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 9 (4,37%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak tersebut karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian yaitu tidak lebih dari 17 hari kerja dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 3,76 hari kerja.

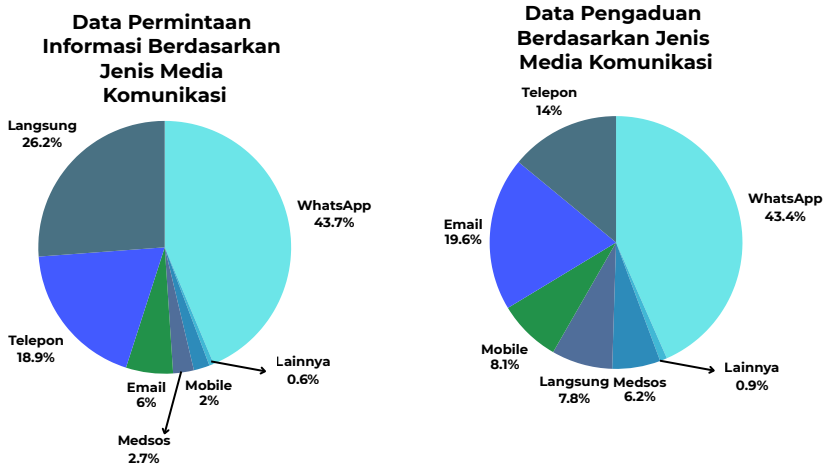
Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III tahun 2025, BPOM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Pusat dan 76 UPT di seluruh Indonesia serta *Contact Center* HALOBPOM sebanyak 41.033 layanan, terdiri dari 39.393 (96,00%) layanan permintaan informasi dan 1.640 (4,00%) layanan pengaduan.

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 20.630 (52,37%) layanan dan karyawan sebanyak 11.435 (29,03%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 695 (42,38%) layanan dan karyawan sebanyak 434 (26,46 %) layanan.



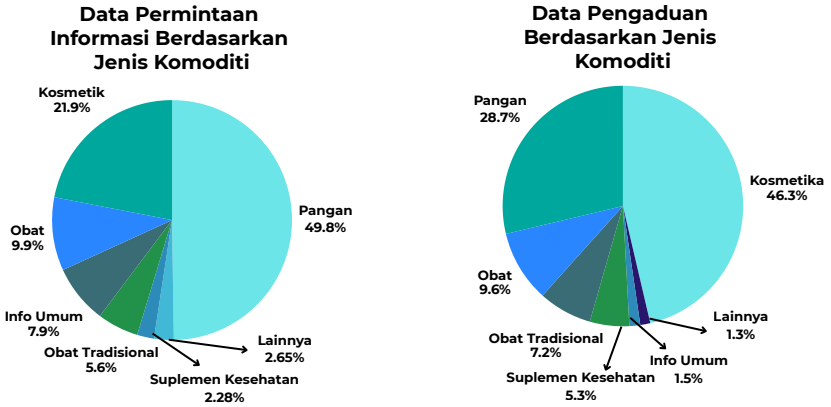
Gambar 22. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan BPOM Berdasarkan Profesi

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 17.207 (43,67%) layanan dan datang langsung (tatap muka) sebanyak 10.313 (26,17%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui WhatsApp sebanyak 712 (43,41%) layanan dan email sebanyak 322 (19,63%) layanan.



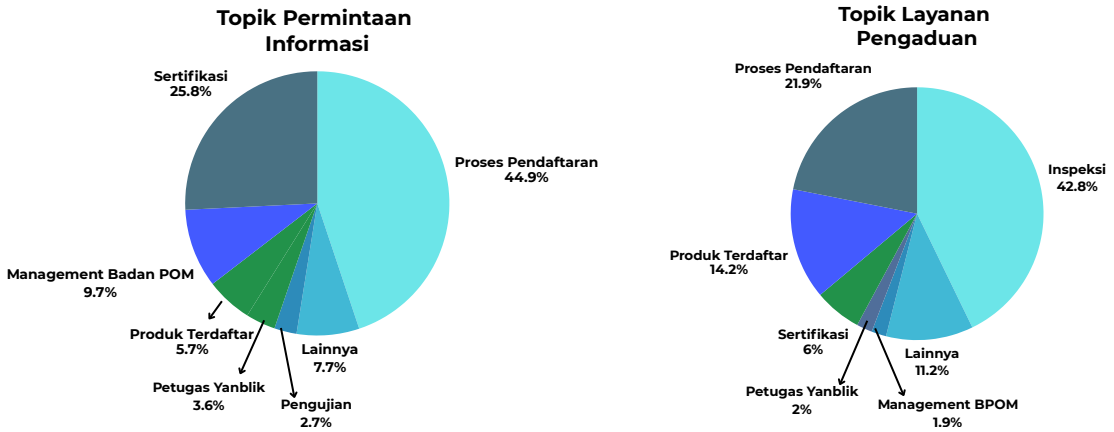
Gambar 23. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan BPOM

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 19.610 (49,76%) layanan dan kosmetika sebanyak 8.645 (21,94%). Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu kosmetik sebanyak 760 (46,34%) layanan dan pangan sebanyak 471 (28,72%) layanan.

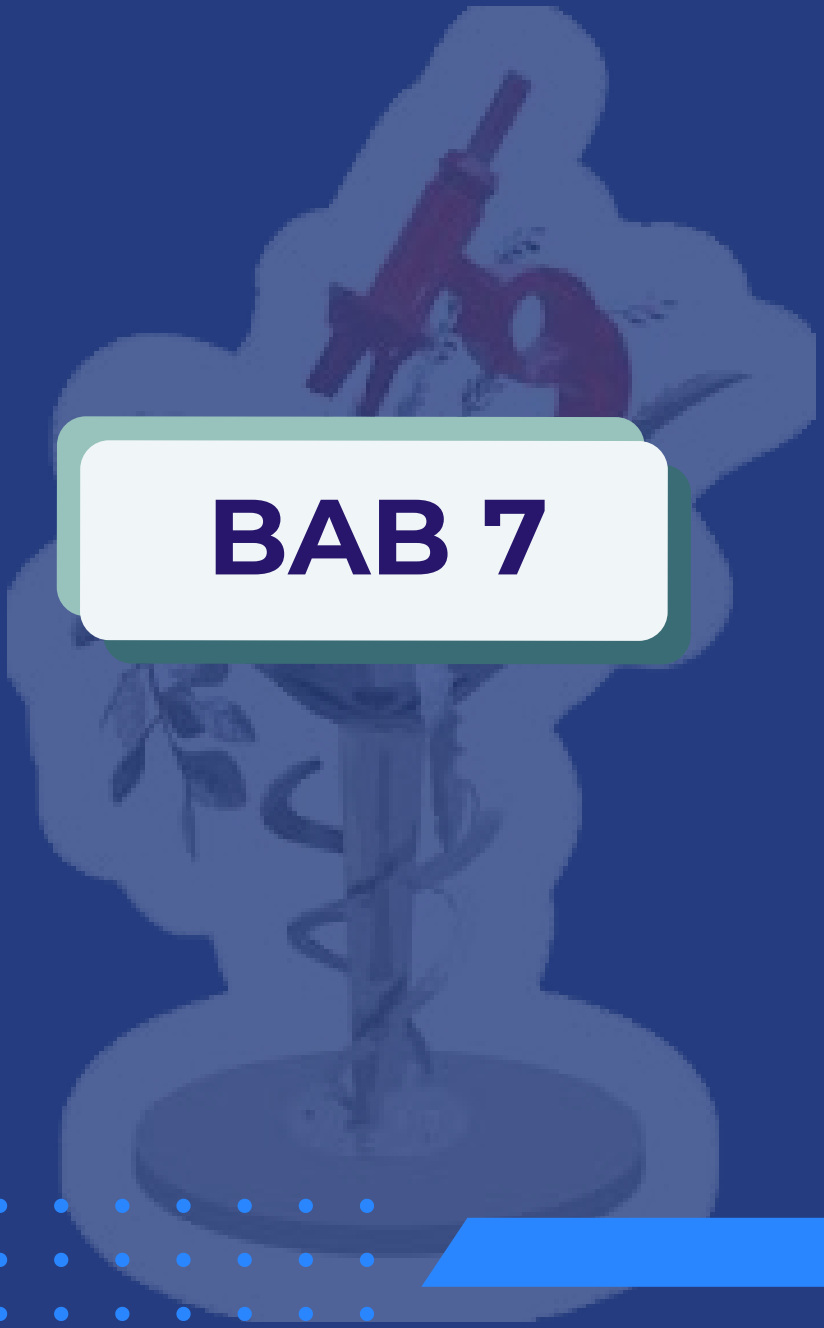


Gambar 24. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh BPOM Berdasarkan Komoditi

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 17.670 (44,86%) layanan dan sertifikasi sebanyak 10.149 (25,77%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang informasi magang/penelitian oleh mahasiswa, penerimaan ASN di BPOM, informasi prosedur kunjungan, informasi nomor kontak unit teknis di BPOM, pengujian laboratorium, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, informasi legalitas produk, konsultasi desain kemasan produk, Informasi Nilai Gizi, dan tanggal kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diadukan yaitu tentang inspeksi seperti pengaduan terkait peredaran produk Obat dan Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), baik secara *online* maupun *offline*, yaitu sebanyak 702 (42,80%) layanan, dan konfirmasi penyampaian perbaikan sebesar 359 (21,89%) layanan.



Gambar 25. Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada BPOM



BAB 7

BAB 7

Digitalisasi Pelayanan Publik

a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPOM

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPOM merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada triwulan III 2025, BPOM terus memperkuat implementasi SPBE melalui berbagai langkah strategis antara lain diskusi teknis dan koordinasi antar unit kerja. Upaya ini difokuskan pada pengembangan kapasitas SDM, penyusunan dan reviu kebijakan internal, serta penguatan kesiapan sistem dan layanan digital.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi ASN di bidang SPBE, BPOM mengadakan rangkaian rapat pembahasan modul pembelajaran yang mencakup kompetensi umum lanjutan, aplikasi teknologi informasi dan *enterprise*, infrastruktur, keamanan, hingga pengelolaan data. Tujuannya adalah menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan tantangan implementasi SPBE di lingkungan kerja.

Dari sisi kebijakan dan penguatan standar layanan digital, telah dilakukan reviu terhadap 6 kebijakan yang telah diimplementasikan serta pembahasan dan penetapan kebijakan yang telah disusun. Selain itu, dalam proses evaluasi SPBE juga dilakukan implementasi Peta Rencana terhadap pengembangan aplikasi SPBE sebagai bagian dari proses pengukuran kinerja layanan digital yang telah dikembangkan.

Pendekatan implementasi SPBE di BPOM tidak hanya berfokus pada pengembangan sistem dan aplikasi, tetapi juga menekankan aspek tata kelola, penguatan SDM, dan pembentukan budaya kerja digital. Strategi menyeluruh ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan serta meningkatkan nilai indeks SPBE BPOM.

b. BPOM Mobile

BPOM Mobile merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi BPOM yang akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi BPOM, masyarakat dan *stakeholder* dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. BPOM Mobile juga merupakan salah satu bentuk dukungan implementasi digitalisasi atau *e-government* yang bermanfaat dalam peningkatan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari BPOM. Berdasarkan data aktivitas BPOM Mobile dari tahun 2018 hingga September 2025, aplikasi ini telah diunduh oleh 2.883.966 pengguna, dengan total aktivitas pemindaian atau pemakaian fitur *scan* 2D barcode mencapai 27.206.246 kali, serta menerima 12.586 laporan pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat.

BPOM Mobile telah memperbarui aplikasi dengan menambahkan beberapa menu baru, yaitu Info Alur Registrasi Produk, Info BPOM di Indonesia, PPID BPOM, dan JDIH BPOM. Bukan hanya pembaruan menu, terdapat juga fitur notifikasi, penambahan survei setelah mengakses *e-labeling*, dan pengaduan efek samping untuk akun tenaga kesehatan.

C. Layanan Data Terbuka

Layanan data terbuka merupakan kegiatan penyajian data dan informasi, salah satunya adalah BPOM *Command Center* (BCC). BCC menyajikan visualisasi data dan informasi untuk kebutuhan pimpinan dalam mendukung pembuatan kebijakan dengan memberikan kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses bisnis di BPOM secara komprehensif dan *real time* dalam bentuk *dashboard*. Data dan informasi yang disajikan berasal dari unit kerja di BPOM yang kemudian diolah dan divisualisasi sesuai kebutuhan organisasi.

Pada triwulan III tahun 2025, BCC telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung layanan data terbuka antara lain penerimaan kunjungan dari Wakil Ketua DPR RI pada tanggal 15 Juli 2025, penerimaan kunjungan tamu acara *International Symposium on Dissolution Science & Quality Drug Development* pada tanggal 29 Juli dan 18 Agustus 2025, dan penerimaan kunjungan Akademi dan Industri Program Studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan pada tanggal 19 Agustus 2025.

d. Penyelenggaraan Pendaftaran Sistem Elektronik

Dalam rangka melaksanakan amanat SPBE salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah *clearance* EGA SPBE yang dilaksanakan oleh setiap instansi sebelum melakukan pekerjaan atau pengadaan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada proses *clearance* EGA SPBE tahun 2025 ditetapkan persyaratan tambahan bahwa seluruh sistem elektronik yang diajukan wajib didaftarkan pada layanan Pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Proses pendaftaran ini wajib dilakukan oleh setiap pengelola sistem elektronik, oleh karena itu perlu dilakukan pendaftaran pejabat dan sub pejabat untuk mendapatkan akses pada https://pse.layanan.go.id/login. Pendaftaran sub pejabat sistem elektronik BPOM dilaksanakan melalui 3 tahap dengan total 27 unit kerja.

e. Pemenuhan Standarisasi Sistem Informasi

Standar Sistem Informasi (SSI) merupakan pedoman utama bagi seluruh unit kerja dan pengembang sistem di lingkungan BPOM. Standar ini mengatur seluruh proses pembangunan sistem, dari pengajuan awal hingga pemeliharaan pascaimplementasi. Dasar Hukum Pedoman berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 445 tahun 2023 dan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2024.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat 46 usulan pengembangan aplikasi yang sudah diterima oleh Pusdatin. Seluruh inisiasi proyek pengembangan aplikasi yang diterima akan dilakukan analisis dan kajian kesesuaian antara spesifikasi pengembangan yang diajukan dengan Peta Rencana BPOM. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi BPOM telah sejalan dengan Peta Rencana SPBE yang disusun untuk dapat menghasilkan layanan yang terpadu.

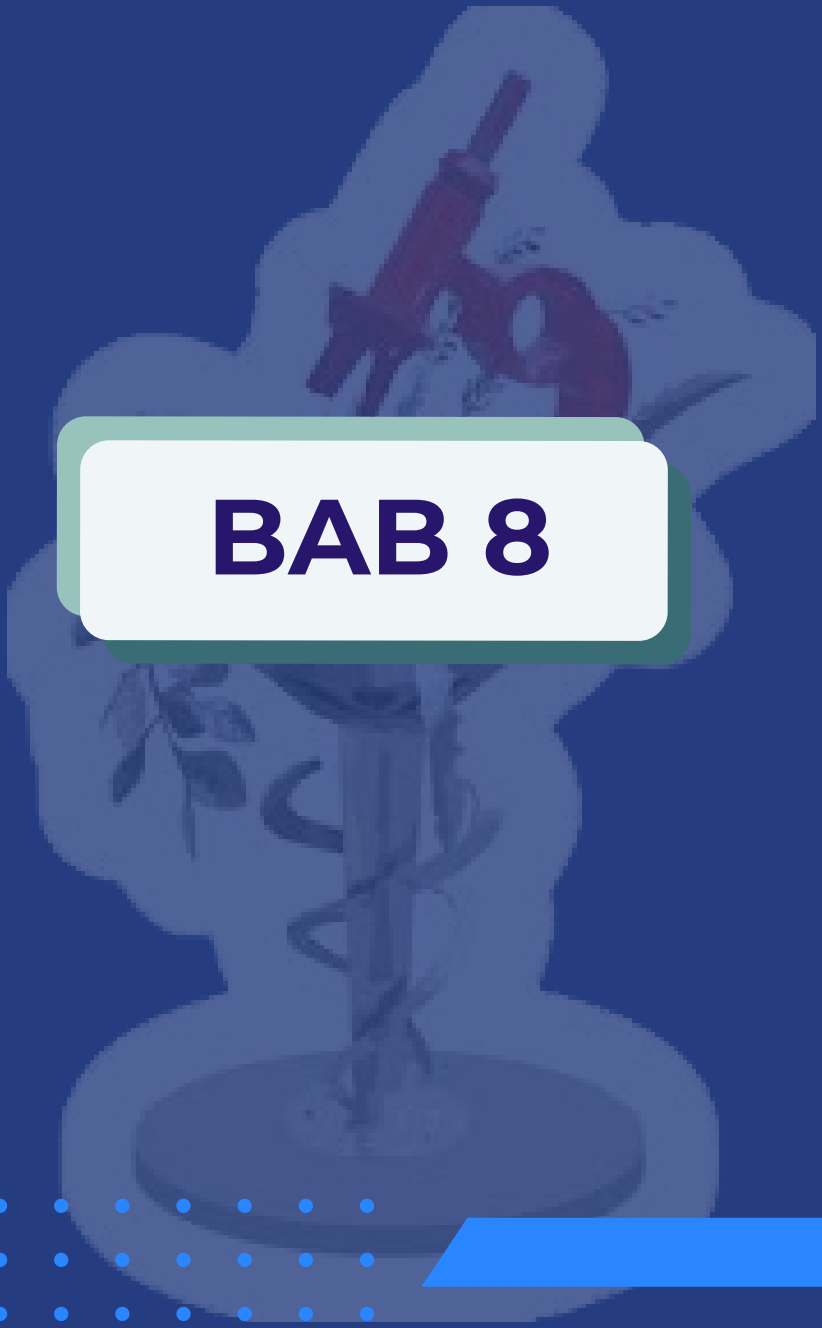
f. Pelaksanaan *Vulnerability Assessment* (VA)

Vulnerability Assessment (VA) atau uji kerentanan adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kelemahan (*vulnerability*) dalam sistem, aplikasi, jaringan atau infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk merusak, mencuri atau mengganggu sistem. Dasar pelaksanaan uji kerentanan yaitu Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.

Tujuan melakukan uji kerentanan sebagai langkah awal menjaga aset sistem informasi dan memberikan peringatan keamanan siber. Sampai dengan triwulan III 2025, telah dilaksanakan uji kerentanan terhadap 20 aplikasi internal BPOM.

Tabel 3. Daftar Aplikasi Internal BPOM yang Sudah Lulus *Vulnerability Assessment*

No	SIT/UAT	Periode SIT/UAT
1	SIT SMARTPOM	Juli 2025
2	SIT Satu Data	Agustus 2025
3	SIT SIPT	Agustus 2025
4	SIT Satu Data ke 2	Agustus 2025
5	Sit Knowledge Base Contact Center	Agustus 2025
6	SIT Evortala Modul Koin dan Monev MPP	Agustus 2025
7	SIT Antrian Online	Agustus 2025
8	SIT TTAC	September 2025
9	SIT Gateway OSS	September 2025
10	SIT E-Standarpangan	September 2025
11	SIT ASROT	September 2025
12	SIT E-Payment	September 2025
13	UAT Evortala	Juli 2025
14	UAT Smartpom Modul dan NF	Juli 2025
15	UAT Satu Data	Agustus 2025
16	UAT Knowledge Base Contact Center	Agustus 2025
17	UAT Aplikasi Evortala modul Koin BPOM dan Monev MPP	Agustus 2025
18	UAT Aplikasi SIPT Modul Sarana Tidak Berizin dan Modul CAPA	September 2025
19	UAT Aplikasi Antrian Online	September 2025
20	UAT Aplikasi TTAC	September 2025



BAB 8

BAB 8

Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

a. Penyusunan Regulasi

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, telah ditetapkan 26 Peraturan BPOM, 40 Keputusan/Surat Edaran Kepala BPOM, dan 60 Rumusan Perjanjian.

Judul Peraturan BPOM

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Batch/Lot Vaksin
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Kajian Risiko Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat

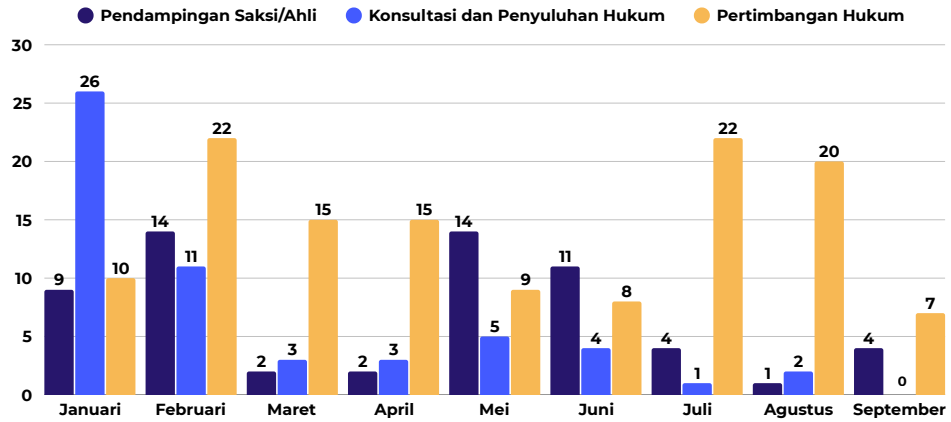
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Verifikasi Metode Analisis Obat dan Bahan Obat
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Peran Serta Masyarakat
17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik
18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penagwasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik
19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Bahan Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif
20. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik
21. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
22. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penarikan dan Pemusnahan Pangan Olahan

23. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
24. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Laksana Persetujuan Obat Pengembangan Baru
25. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik
26. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kajian Risiko Penggunaan Bahan Baku dalam Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik Sediaan Tertentu.

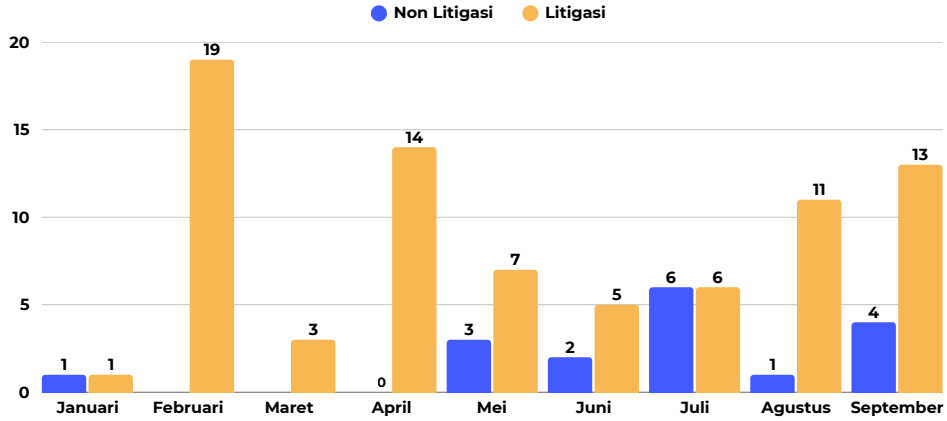
b. Layanan Advokasi Hukum

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh BPOM sampai dengan triwulan III tahun 2025, jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 340 layanan yang terdiri dari 244 layanan advokasi hukum dan 96 layanan penanganan perkara.

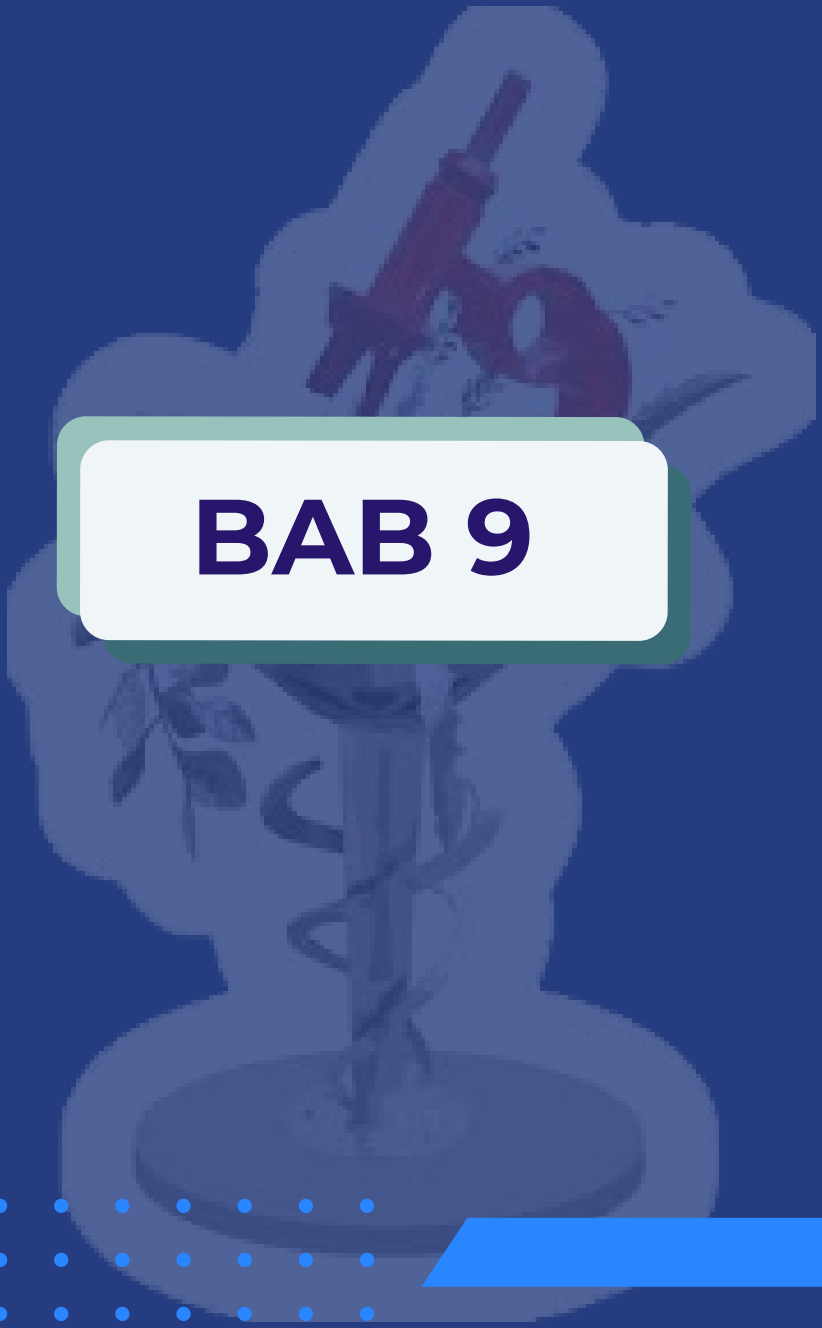


Gambar 26. Layanan Advokasi Hukum BPOM s.d. Triwulan III Tahun 2025



Gambar 27. Layanan Penanganan Perkara BPOM s.d. Triwulan III Tahun 2025

0



BAB 9

BAB 9

Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

a. Penataan dan Penguatan Organisasi

BPOM secara proaktif melaksanakan penataan organisasi di tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa fungsi, tugas dan kewenangan setiap unit organisasi relevan, efektif dan selaras dengan arah kebijakan BPOM, guna menghindari tumpang tindih antar unit. BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap uraian fungsi dengan terbitnya 3 (tiga) Keputusan Kepala BPOM terdiri atas:

1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 356 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 357 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 358 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Selain pada tingkat organisasi induk, upaya penataan organisasi juga dilakukan terhadap UPT BPOM di daerah melalui evaluasi klasifikasi terhadap 76 UPT menggunakan instrumen sesuai Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi UPT pada BPOM. Seluruh data yang digunakan pada evaluasi klasifikasi UPT BPOM tahun 2025 bersumber dari Laporan Tahunan UPT BPOM Tahun 2024. Berdasarkan hasil penataan organisasi UPT BPOM direkomendasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan klasifikasi 13 Loka POM menjadi Balai;
2. Peningkatan klasifikasi 4 Balai POM menjadi Balai Besar; dan
3. Pembentukan 7 Loka POM.

BPOM telah menyampaikan usulan penataan organisasi berdasarkan hasil evaluasi UPT BPOM kepada Menteri PANRB melalui Surat Kepala BPOM nomor OT.01.02.2.09.25.327 tanggal 18 September 2025 hal Usulan Penataan BPOM.

b. Pengelolaan Reformasi Birokrasi BPOM

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, BPOM diinstruksikan untuk menyusun Rencana Aksi RB Tahun 2025. Pelaksanaan RB Tahun 2025 difokuskan pada monitoring tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024 dari Kementerian PANRB. Tema RB Tematik Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan 6 (enam) Program Prioritas Pemerintah, meliputi: 1) Pengentasan Kemiskinan; 2) Realisasi Investasi; 3) Hilirisasi; 4) Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan; 5) Ketahanan Pangan Nasional; dan 6) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan.

Penyusunan rencana aksi RB BPOM Tahun 2025 bersama dengan tim evaluator internal dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 9 September 2025 (Rencana Aksi RB General) dan 11 s.d. 12 September 2025 (Rencana Aksi RB Tematik). Penyusunan Rencana Aksi RB BPOM Tahun 2025 telah memperhatikan catatan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RB BPOM tahun 2024 serta telah diselaraskan dengan indikator dan target kinerja sesuai Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029. Rencana aksi RB tersebut telah disahkan melalui Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi Pelaksanaan RB oleh Sekretaris Utama dan diunggah pada Portal RB Nasional.

c. Tinjau Ulang Dokumen SOP Makro BPOM

BPOM melakukan tinjau ulang terhadap proses bisnis meliputi peta proses bisnis , peta subproses bisnis, peta hubungan proses bisnis, peta lintas fungsi, dan SOP makro di lingkungan BPOM. Tinjau ulang bertujuan untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam penerapan sistem manajemen pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi. Pembahasan dilakukan secara daring maupun *hybrid* dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait. Proses pembahasan diarahkan dengan merujuk pada prinsip SERA, yaitu penyederhanaan proses (*Simplification*-S), penghilangan proses yang tidak perlu (*Elimination*-E), pembuatan proses yang sama sekali baru (*Reengineering*-R), dan pengautomatisasian (*Automation*-A). Sampai dengan triwulan III, terdapat 83 SOP Makro di lingkungan BPOM yang telah ditinjau ulang dan disahkan oleh Sekretaris Utama.

d. Sosialisasi dan *Awareness* Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi merupakan rangkaian kegiatan dari pembangunan Sistem Manajemen POM Terintegrasi yang dimulai dengan penyusunan dan sosialisasi Manual Sistem Manajemen Terintegrasi serta bimbingan teknis penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi. Pelaksanaan bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik (*awareness*) bagi seluruh pegawai terkait apa yang dimaksud dengan Sistem Manajemen POM Terintegrasi, tujuan dan manfaat serta bentuk pelaksanaannya.

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka dan daring selama satu hari dan melibatkan perwakilan Tim Penyelenggara SPI Unit Kerja yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.08.25.98 Tahun 2025 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern BPOM.

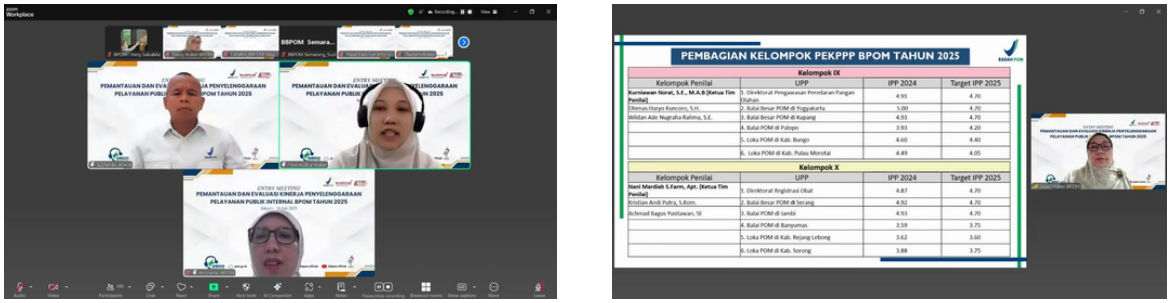
e. Pengembangan Pelayanan Publik

1. **Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Rencana Aksi Survei Kepuasan Masyarakat Semester I 2025**

Survei Kepuasan Masyarakat BPOM Tahun 2024 dilaksanakan pada 97 Unit Pelayanan Publik (UPP) dengan rincian 21 unit kerja di lingkungan BPOM Pusat, 42 Balai Besar/Balai POM, dan 34 Loka POM. Dari hasil survei kepada 8.658 responden, diperoleh nilai SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik BPOM sebesar 93,47. Rekomendasi atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 kepada masing-masing UPP yaitu menyusun rencana aksi tindak lanjut untuk 3 unsur dengan nilai terendah dengan memperhatikan saran/masukan responden. Berdasarkan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) hasil SKM tahun 2024, terdapat 323 RATL yang telah dilakukan dari 389 RATL yang disusun.

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Internal BPOM Tahun 2025

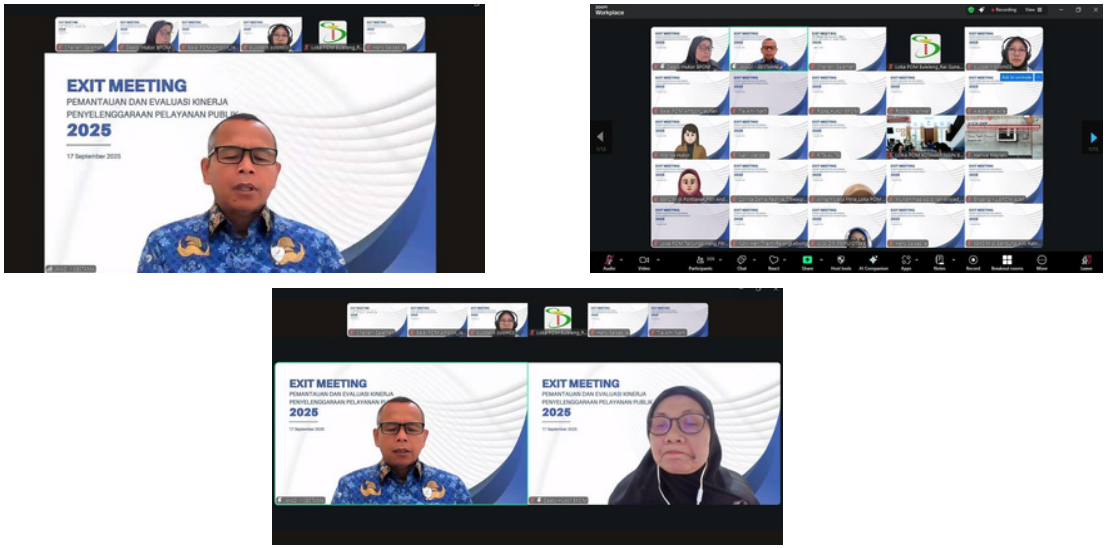
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) internal BPOM tahun 2025 mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP. Rangkaian pelaksanaan PEKPPP internal BPOM tahun 2025 pada triwulan III 2025 diawali dengan *entry meeting* yang dibuka oleh Sekretaris Utama BPOM kemudian dilanjutkan dengan penyampaian mekanisme teknis pelaksanaan PEKPPP BPOM tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh 97 perwakilan UPP BPOM di seluruh Indonesia dan Tim Penilai PEKPPP BPOM tahun 2025.



Gambar 28. Pelaksanaan *Entry Meeting* PEKPPP BPOM Tahun 2025

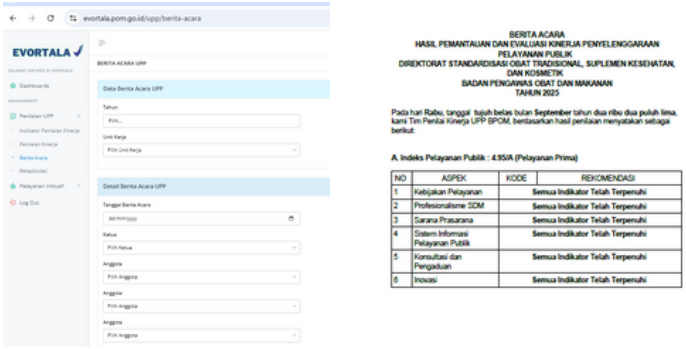
Pelaksanaan penilaian PEKPPP pada bulan Juli sampai dengan September dengan menggunakan aplikasi evortala yang dapat diakses melalui tautan evortala.pom.go.id.

Pada tanggal 17 September 2025 dilaksanakan *exit meeting* yang merupakan penyampaian hasil penilaian pada seluruh UPP beserta rekomendasi tiap aspek penilaian secara umum yang ditemukan selama proses evaluasi.



Gambar 29. Pelaksanaan *Exit Meeting* PEKPPP BPOM Tahun 2025

Setelah pelaksanaan *exit meeting* PEKPPP, hasil penilaian disepakati melalui penandatangan berita acara hasil penilaian yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dan Kepala UPP. Penandatanganan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi evortala dan telah terhubung pada BSrE sehingga legalitas dari dokumen Berita Acara diakui keabsahannya.



Gambar 30. Berita Acara pada Aplikasi Evortala

3. Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2025

Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di lingkungan BPOM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Terdapat 5 aspek yang dipantau meliputi aspek kebijakan pelayanan dan kepemimpinan, aspek aksesibilitas fisik, aspek aksesibilitas informasi dan komunikasi, aspek akomodasi yang layak, dan aspek sumber daya manusia.

Kegiatan diawali dengan penyampaian data setiap Unit Pelayanan Publik (UPP) pada aplikasi Evortala pada bulan September 2025. Selanjutnya dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan secara internal di lingkungan BPOM pada bulan Oktober tahun 2025.

4. Kompetisi Inovasi (KOIN) Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025

Pelaksanaan KOIN BPOM Tahun 2025 memasuki tahun kedua setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2024. Dasar pelaksanaan berupa Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.07.25.89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 serta Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.07.25.90 tentang Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi (KOIN) Pelayanan Publik Tahun 2025.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.07.25.89 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan budaya inovasi bidang pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara maksimal, serta meningkatkan persiapan dalam menghadapi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada level Kementerian/Lembaga, diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang melibatkan seluruh unit pelayanan publik baik di tingkat pusat dan unit pelaksana teknis;
b. bahwa dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun pedoman penyelenggaraan kompetensi inovasi pelayanan publik tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.07.25.90 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARA
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan budaya inovasi bidang pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara maksimal, serta meningkatkan persiapan dalam menghadapi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada level Kementerian/Lembaga, diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang melibatkan seluruh unit pelayanan publik baik di tingkat Pusat dan Unit Pelaksana Teknis;
b. bahwa sebagai bagian penting dari penyelenggaraan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025;
c. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini memiliki kompetensi dan kualitasi di bidangnya serta telah memenuhi syarat dan/atau ketentuan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Page 1 / 4

Gambar 31. Surat Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi (KOIN) Pelayanan Publik Tahun 2025.

Sampai akhir triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan KOIN BPOM telah melalui tahap sosialisasi dan publikasi terkait ketentuan teknis dan administrasi keikutsertaan dalam KOIN BPOM, pembukaan pengajuan proposal inovasi untuk seluruh UPP di lingkup BPOM, seleksi administrasi oleh sekretariat hingga penilaian substansi proposal oleh tim evaluator.



BAB 10

BAB 10

Kerjasama Dalam Negeri dan Internasional

a. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPOM Dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan

Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang Obat dan Makanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada tanggal 22 Juli 2025. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan pada pertemuan 3 kementerian/lembaga yaitu Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan BPOM. Pada pertemuan tersebutdibahas kerja sama yang akan dilakukan antarlembaga dalam upaya peningkatan ketersediaan Obat dan Makanan untuk mendukung kesehatan dan ketahanan nasional.



Gambar 32. Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama Antara Kemenkes - Kemhan - BPOM yang Diselenggarakan di Jakarta pada Tanggal 22 Juli 2025

Saat ini tercatat 14.238 nomor izin edar (NIE) obat yang beredar di wilayah Indonesia. Namun demikian masih ada sejumlah problem. Taruna Ikrar menyebut ketercukupan obat masih menjadi kendala besar. Padahal obat merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan bagian dari ketahanan nasional. Kerja sama ini bertujuan mendukung program prioritas nasional di bidang kesehatan dan pertahanan. Nantinya BPOM bersama Kementerian Pertahanan akan mendukung penyediaan obat-obatan generik yang terjangkau di gerai apotek desa sebagai bagian dari upaya menjamin akses obat yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.

b. BPOM Perkuat Diplomasi Regulasi dan Inovasi Kesehatan Melalui Kolaborasi Si Strategi di Australia

Kepala BPOM dan delegasi telah melakukan kunjungan kerja ke Sydney dan Canberra, Australia pada 22 – 25 Agustus 2025 untuk memperkuat diplomasi kesehatan global, sinergi regulasi, serta kolaborasi riset dan inovasi bersama mitra Australia, baik pemerintah, akademisi, maupun industri. Di Canberra, Kepala BPOM menghadiri peluncuran Inaugural Internship Program and Regulatory Cooperation di Therapeutic Goods Administration (TGA). Program magang merupakan kerja sama BPOM-TGA sebagai implementasi kolaborasi kedua lembaga di bawah kerangka Indo-Pacific Regulatory Strengthening Program (RSP). Program dibagi dalam tiga tahap dan resmi dibuka dengan penempatan dua pegawai BPOM untuk magang perdana terkait fungsi farmakovigilans selama tiga minggu di TGA.



Gambar 33. Kunjungan Kerja untuk Memperkuat Diplomasi yang Diselenggarakan di Canberra, Australia pada Tanggal 22-25 Agustus 2025

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM juga melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan TGA guna membahas kerangka regulasi, prioritas kebijakan, serta peluang kolaborasi dalam menghadapi dinamika kesehatan global. Fokus utama pembahasan adalah penguatan kapasitas regulatori, adaptasi terhadap teknologi baru, serta peningkatan kepercayaan publik melalui transparansi dan penegakan hukum yang efektif. Kedua pihak mengidentifikasi sejumlah bidang kerjasama strategis, yaitu regulasi produk kesehatan inovatif, pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik, peningkatan kapasitas uji klinik di Indonesia melalui pertukaran pengalaman dan dukungan dalam pembentukan mekanisme nasional yang lebih efisien, serta peningkatan akses obat inovatif melalui *joint assessment*.



Gambar 34. Kepala BPOM menjadi pembicara di perkuliahan tamu yang Diselenggarakan di University of New South Wales (UNSW)

Di University of New South Wales (UNSW), Kepala BPOM menyampaikan kuliah tamu dengan tema 'Pengalaman Kolaborasi BPOM dengan Akademia untuk mendukung Penelitian dan Pengembangan Produk Farmasi Inovatif' yang dihadiri para pimpinan UNSW, akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Kepala BPOM menyampaikan pentingnya kolaborasi *Academia-Business-Government* (ABG) sebagai kunci sukses pengembangan produk farmasi inovatif, serta mendorong penguatan uji klinik di Indonesia guna mempercepat transfer ilmu pengetahuan dan peningkatan layanan kesehatan. Setelahnya, Kepala BPOM berkesempatan untuk berdiskusi dengan UNSW mengenai kapasitas riset UNSW melalui berbagai pusat unggulan dengan pendekatan multidisipliner.

Pada kunjungan kerja tersebut, Kepala BPOM juga berkunjung ke laboratorium riset BioNyeri. BioNyeri merupakan perusahaan rintisan bioteknologi yang berfokus pada terapi berbasis bahan alam Indonesia, khususnya manajemen nyeri dan onkologi. BioNyeri memiliki kapasitas riset modern dan telah melakukan riset awal terhadap lebih lebih dari 15 tanaman obat Indonesia yang berpotensi dikembangkan menjadi Obat Herbal Terstandar.



Gambar 35. Kepala BPOM melakukan kunjungan ke Laboratorium Riset BioNyeri

Kepala BPOM menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan obat bahan alam berbasis tanaman Indonesia melalui kerja sama internasional yang strategis dan berkelanjutan.

c. Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke Irlandia dan Swiss

Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D. dan delegasi telah melaksanakan kunjungan kerja ke Swiss dan Irlandia pada tanggal 4–10 September 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis BPOM untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem regulatori global serta mempercepat pencapaian status WHO Listed Authority (WLA). Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperluas kerja sama internasional di bidang regulasi obat, vaksin, dan inovasi pangan.

1. Pertemuan dengan Assistant Director-General WHO



Gambar 36. BPOM mengadakan pertemuan dengan Assistant Director-General for Access to Medicines and Health Products WHO

BPOM mengadakan pertemuan dengan Assistant Director-General for Access to Medicines and Health Products WHO, Dr. Yukiko Nakatani, untuk menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat sistem regulatori, mendukung kemandirian produksi farmasi nasional, serta memperluas akses terhadap vaksin dan bioterapi bermutu.

Dalam pertemuan tersebut, WHO mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mengoptimalkan mRNA Technology Hub dan mendukung kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah World Local Production Forum pada tahun 2027.

Pertemuan juga membahas perkembangan upaya BPOM dalam memperoleh status WHO Listed Authority (WLA), yaitu pengakuan bahwa sistem regulatori nasional telah memenuhi standar internasional dalam menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk medis. Evaluasi lapangan terhadap BPOM telah dilakukan pada 6–13 Agustus 2025 dan kini menunggu keputusan dari Technical Advisory Group.

Selain itu, dibahas pula peluang kolaborasi antara BPOM dan WHO, termasuk partisipasi Indonesia dalam Collaborative Registration Procedure sebagai mekanisme *reliance* untuk mempercepat penilaian dan registrasi produk medis, pemanfaatan potensi nasional dalam

produksi produk darah dan plasma, serta optimalisasi posisi strategis Indonesia setelah perpindahan dari WHO Regional Office for South-East Asia (SEARO) ke WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO).

2. **The 16thConference of the International Association of Medical Regulatory Authorities**



Gambar 37. Kepala BPOM menghadiri The 16th Conference of the International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA)

Pada tanggal 4-6 September 2025, Kepala BPOM menghadiri The 16th Conference of the International Association of Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di Dublin sebagai Anggota Dewan Direktur IAMRA yang mewakili Kawasan Asia.

Dalam forum ini, Kepala BPOM berpartisipasi aktif dalam General Assembly dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan strategis organisasi. Kehadiran Indonesia dalam forum internasional ini merupakan representasi penting dari kepemimpinan regional di bidang regulasi obat, sekaligus menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan global yang berorientasi pada keselamatan publik dan penguatan sistem kesehatan.

Sebagai puncak dari kontribusinya selama menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur IAMRA periode 2021–2025, Kepala BPOM menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Members General Assembly. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPOM secara resmi diangkat menjadi Anggota IAMRA Advisory Board periode 2025–2029, sebuah posisi strategis yang menandai kepercayaan dan pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia di bidang regulasi obat global. Pengangkatan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperluas perannya dalam mendorong kolaborasi lintas negara di bidang pengawasan obat dan kesehatan masyarakat.

d. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dengan Badan Karantina Indonesia

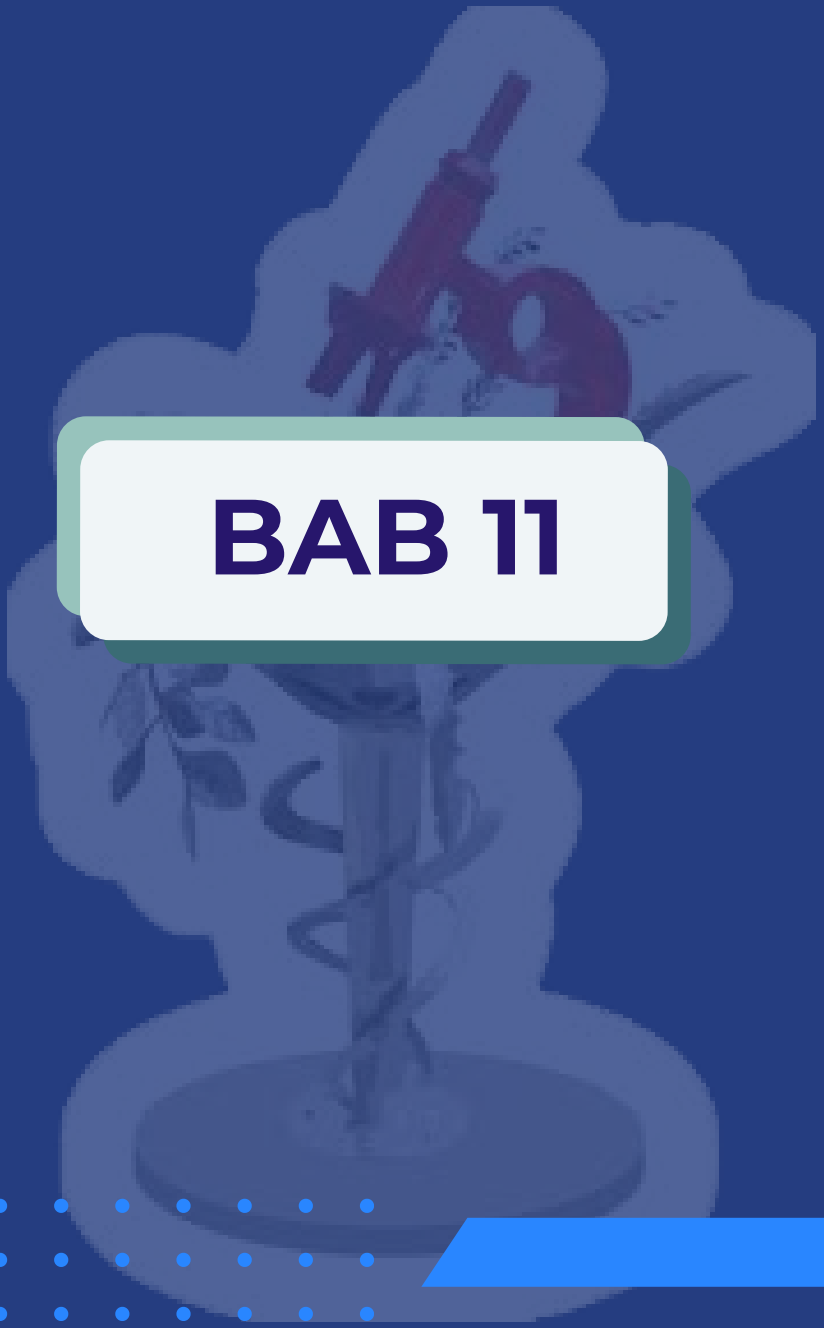
BPOM menjalin kerja sama dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 12 September 2025. MoU yang ditandatangani hari ini berisi tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, serta pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Sinergi ini merupakan upaya memperkuat pengawasan terhadap produk yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.



Gambar 38. Kepala BPOM Menandatangani Kerja Sama dengan Badan Karantina Indonesia

Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk menjawab tantangan perdagangan global yang semakin kompleks, terutama terkait peredaran sediaan farmasi dan makanan. Selama ini, BPOM dan Barantin memang kerap bersinggungan dalam pengawasan di pintu masuk dan keluar Indonesia, baik di pelabuhan, bandara, maupun perbatasan darat.

Selain pengawasan di perbatasan, MoU juga mencakup kerja sama dalam penyusunan regulasi, penguatan laboratorium pengujian, pertukaran data, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penanganan notifikasi lintas negara. Dengan adanya Mou ini, BPOM dan Barantin berharap pengawasan sediaan farmasi dan makanan di Indonesia bisa semakin efektif, sekaligus mendukung daya saing produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil,dan menengah. Sinergi kedua lembaga juga menjadi bagian dari upaya bersama menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

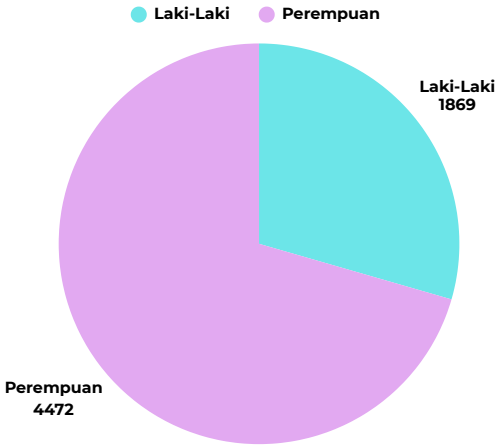


BAB 11

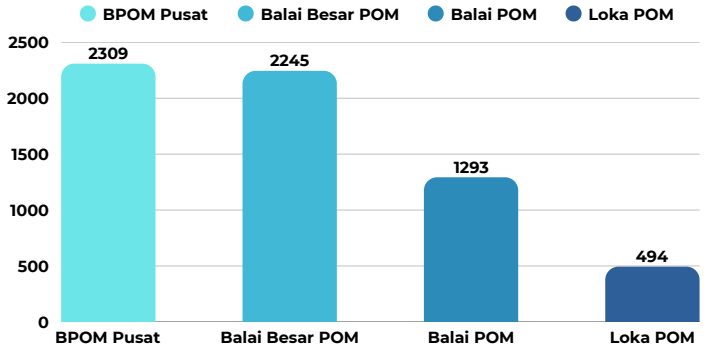
BAB 11

Sumber Daya Manusia

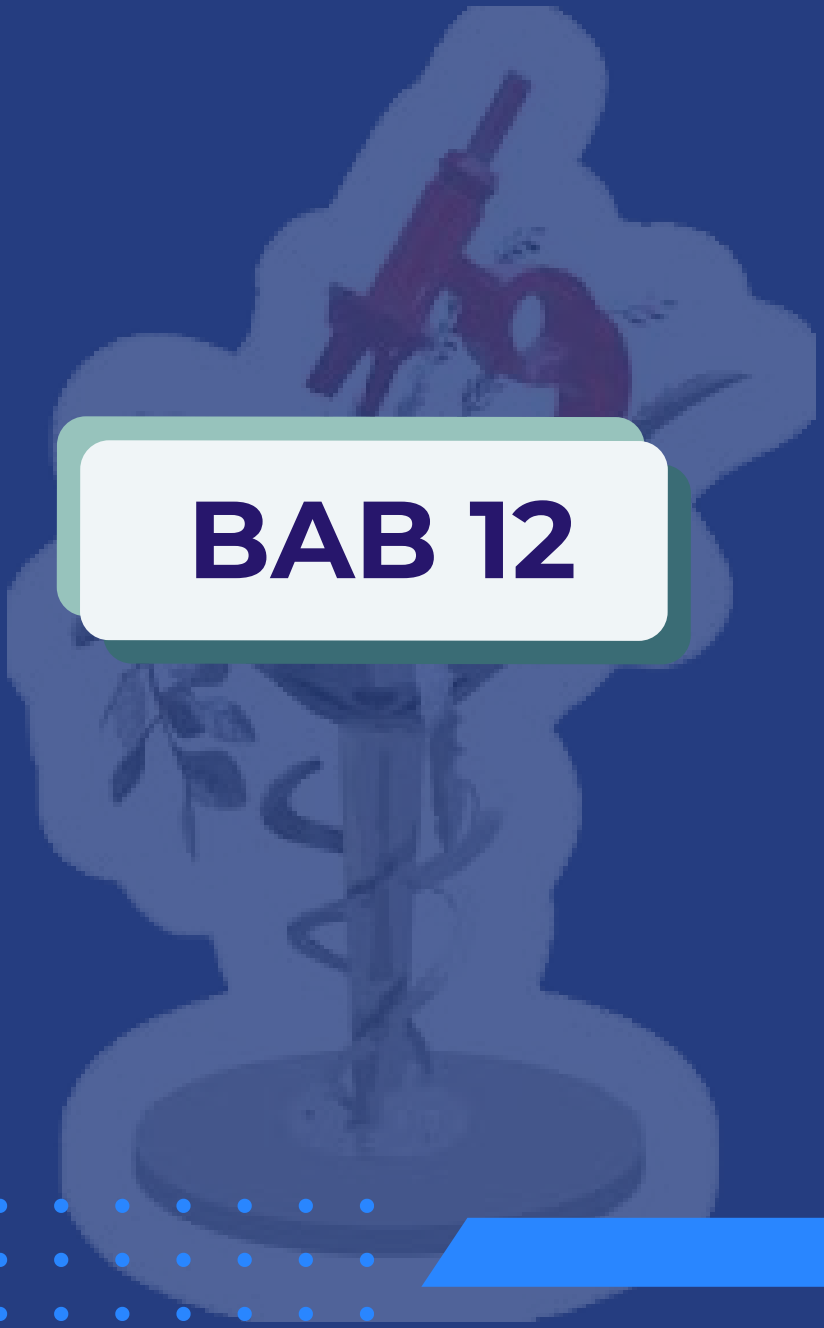
Sampai dengan triwulan III tahun 2025, total pegawai di BPOM sebanyak 6.341 pegawai yang terdiri dari 4.742 orang PNS, 741 CPNS, 855 PPPK, dan 3 POLRI. Jumlah pegawai berdasarkan gender terdiri dari 645 orang (27,93%) laki-laki dan 4.472 orang (70,53%) perempuan. Jika dilihat berdasarkan tipe kepegawaian, pegawai BPOM terdiri dari 5.439 orang (85,78%) Fungsional, 736 orang (11,61%) Pelaksana, dan 166 orang (2,62%) Struktural. Berdasarkan penempatan kerja, terdapat 2.309 (36,41%) pegawai di BPOM Pusat, 2.245 (35,40%) pegawai ditempatkan di Balai Besar POM, 1.293 (20,39%) pegawai ditempatkan di Balai POM, dan 494 (7,79%) pegawai ditempatkan di Loka POM.



Gambar 39. Proporsi Pegawai BPOM Berdasarkan Gender



Gambar 40. Sebaran Pegawai BPOM Berdasarkan Penempatan



BAB 12

BAB 12

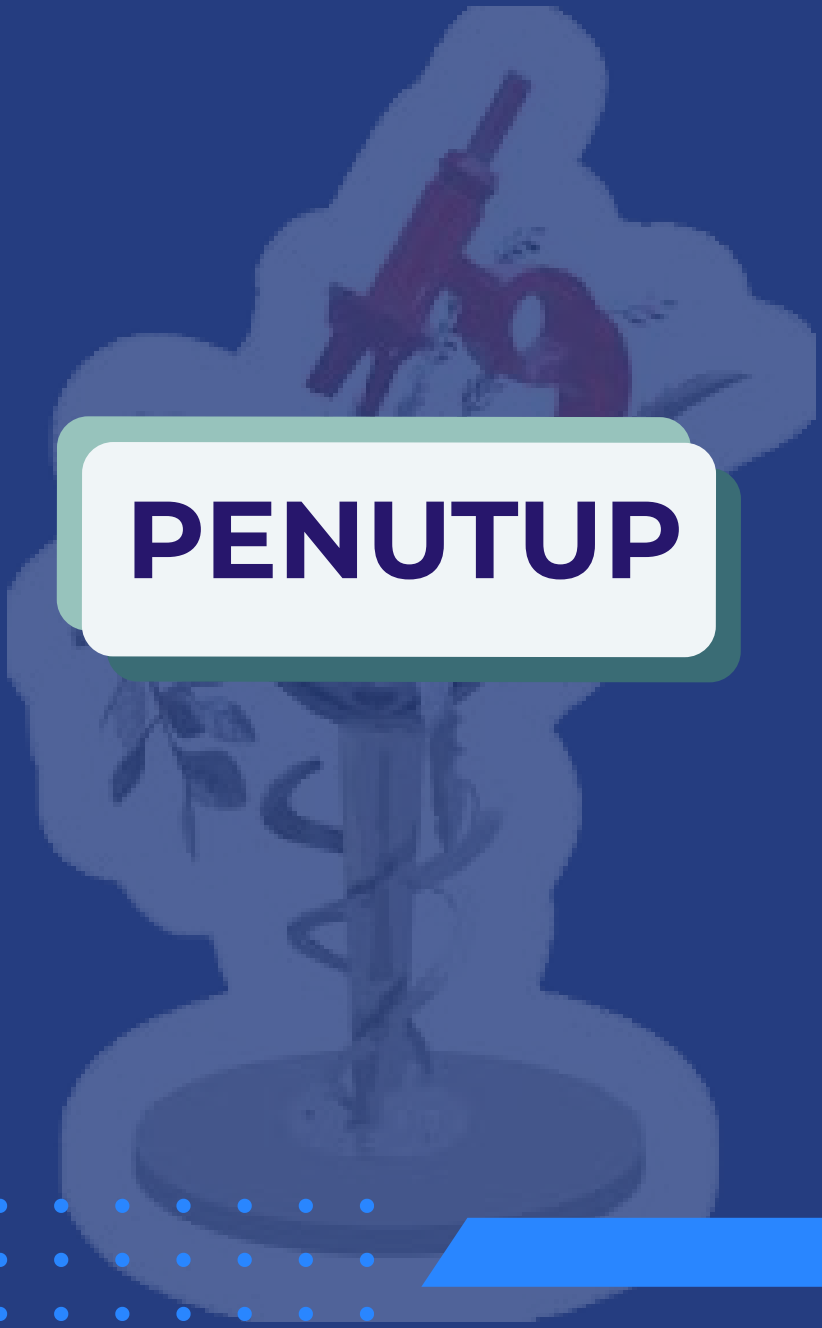
Realisasi Anggaran Sampai dengan September 2025

Total anggaran BPOM Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.560.935.743.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 33 Satker Pusat, 53 Balai Besar/Balai POM dan 20 Loka POM. Pada tahun 2025 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp812.554.787.000,- sehingga pagu efektif sebesar Rp1.748.380.956.000. Realisasi anggaran sampai dengan September tahun 2025 sebesar, Rp1.305.404.754.225,- (74,66%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp662.038.518.902,- realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp602.363.038.448,- dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp41.003.196.875,-

Tabel 4. Realisasi Anggaran s.d September 2025

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	879.995.020.000	662.038.518.902	75,23%
Balai Besar / Balai POM	810.366.195.000	602.363.038.448	74,33%
Loka Pom	58.019.741.000	41.003.196.875	70,67%
Total	1.748.380.956.000	1.305.404.754.225	74,66%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	913.149.379.000	601.202.142.000	234.029.435.000	1.748.380.956.000
Realisasi	691.395.301.955	413.368.972.307	200.640.479.963	1.305.404.754.225
%	75,72%	68,76%	85,73%	74,66%



PENUTUP

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini merupakan sebagian dari keseluruhan kinerja BPOM. Meskipun demikian, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama tahun 2025, yaitu melindungi kesehatan masyarakat Indonesia melalui jaminan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang dengan menjunjung tinggi integritas, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang menyeluruh (termasuk penganggaran), pelaksanaan yang terukur, evaluasi dan analisis hasil yang objektif, serta penerapan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).



LAMPIRAN 1

Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2025. Pemantauan ini mencakup perkembangan realisasi anggaran serta pencapaian sasaran kegiatan dan program, yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini berbagai kendala yang dihadapi serta menetapkan upaya tindak lanjut yang diperlukan.

Pemantauan capaian RKP dilaksanakan secara bulanan. Adapun hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 disajikan dalam dokumen ini.

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
	BPOM	Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	50,73	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,40	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,50	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88,20	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
	BPOM	Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,90	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks RB BPOM	96,30	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar	85,70	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu	77,00	Persentase	86,77	112,69%
		Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	55,40	Persentase	39,74	71,73%
		Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu	72,50	Persentase	83,62	115,34%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	70,00	Persentase	41,27	58,96%
		Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (produsen non UMKM)	35,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
A.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang aman dan bermutu	90,00	Persentase	96,80	107,56%
		Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00	Persentase	71,38	109,82%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00	Persentase	84,40	124,12%
		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00	Persentase	72,53	116,98%
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	57,50	Persentase	100,00	173,91%
		Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	88,50	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	30,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00	Persentase	83,38	100,46%
		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar Jamu Aman	2,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan Grand design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	41,30	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	90,60	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86,87	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,50	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar	75,00	Persentase	70,09	93,45%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51,00	Persentase	81,45	159,71%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00	Persentase	21,33	35,55%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	68,00	Persentase	40,00	58,82%
		Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,00	Persentase	68,90	93,11%
		Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	75,00	Persentase	75,25	100,33%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,69	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,81	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,27	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah desa pangan aman	172,00	Desa	86,74% (Progress)	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	73,00	Pasar	97,81% (Progress)	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	490,00	Sekolah	88,55% (Progress)	
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,30	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,58	Nilai	16,42	18,97%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	60,80	Nilai	39,70	65,30%
		Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59,00	Persentase	74,30	125,94%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,95	Persentase	97,94	104,25%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,55	Persentase	98,23	108,49%
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	Persentase	78,20	78,20%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85,13	Persentase	72,68	85,38%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84,85	Persentase	83,67	98,60%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	86,00	Persentase	95,62	111,19%
		Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	Persentase	50,17	55,75%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100,00	Persentase	79,67	79,67%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	Persentase	2,02	2,02%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	Persentase	51,87	51,87%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,61	Persentase	94,19	111,33%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,97	Persentase	94,57	110,01%
		Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,40	Persentase	96,00	111,11%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,78	Persentase	96,39	111,08%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,60	Persentase	97,09	110,83%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,81	Persentase	93,40	101,73%
		Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,18	Persentase	85,5 (Progress)	
		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,52	Persentase	89,07	102,95%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100,00	Persentase	87,33	87,33%
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	3,01	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	89,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Tervalidasi	96,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	62,00	Persentase	51,28	82,71%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	100,00	Persentase	95,00	95,00%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3,01	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah Profil Jaringan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	4,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase Rekomendasi Intelijen yang Ditindaklanjuti	75,00	Persentase	88,89	118,52%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	100,00	Persentase	90,00	90,00%
1.4	Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,01	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing	9,00	Pelaku Usaha	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90,01	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	89,50	Nilai	95,91	107,16%
		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	91,50	Nilai	88,01	96,19%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu	11,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70,00	Persentase	100,00	142,86%
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	75,00	Persentase	100,00	133,33%
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	98,50	Persentase	98,86	100,37%
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76,00	Persentase	84,01	110,54%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	96,00	Persentase	98,32	102,42%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92,00	Persentase	97,08	105,52%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	80,00	Persentase	83,33	104,16%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	85,00	Persentase	100,00	117,65%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93,00	Persentase	93,24	100,26%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100,00	Persentase	82,00	82,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00	Persentase	83,23	100,28%
		Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3,20	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,65	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan Sarana IRTP	2,00	Laporan	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	91,82	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	35,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	97,00	Persentase	100,00	103,09%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi	11,00	Persentase	9,74	88,55%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib Program Manajemen Risiko	75,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang siap menerapkan peningkatan level pemenuhan regulasi secara pro aktif	65,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Kosmetik	3,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan Kosmetik	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Kosmetik	92,19	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84,00	Persentase	86,21	102,63%
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90,00	Persentase	100,00	111,11%
		Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90,00	Persentase	92,97	103,30%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84,00	Persentase	87,88	104,62%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana/fasilitas dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	92,00	Persentase	93,63	101,77%
		Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94,20	Persentase	95,86	101,76%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Kosmetik	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi	70,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,85	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100,00	Persentase	100,00	100,00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	3,60	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	10,00	Kajian	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	93,37	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan penyerahan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	84,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan sesuai standar	96,00	Persentase	92,55	96,41%
		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan penyerahan obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	88,00	Persentase	94,04	106,86%
		Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu	96,50	Persentase	97,45	100,98%
		Persentase kesesuaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR	80,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	100,00	Persentase	90,00	90,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
1.8	Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	3,83	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan KMEI ONPPZA	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	12,00	Jumlah	9,00	75,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	93,80	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase hasil pengawasan keamanan, mutu, dan informasi Obat dan NAPPZA oleh UPT BPOM yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	85,00	Persentase	75,72	89,08%
		Persentase hasil pengawasan keamanan, mutu, dan informasi Obat dan NAPPZA oleh UPT BPOM yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	85,00	Persentase	75,72	89,08%
		Persentase hasil pengawasan mutu ONPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	83,25	Persentase	86,79	104,25%
		Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	89,40	Persentase	94,57	105,78%
		Persentase laporan pengawasan produk tembakau yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	85,00	Persentase	88,99	104,69%
		Persentase materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan sesuai rencana aksi	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase pelaku usaha produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang melaporkan informasi produk sesuai ketentuan	57,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	78,00	Persentase	91,48	117,28%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat; Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan Certificate of Pahrmaceutical Product (CPP) yang Diselesaikan Tepat Waktu	94,00	Persentase	95,95	102,07%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA	100,00	Persentase	100,00	100,00%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,60	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan PIRT	2,00	Jumlah	1,00	50,00%
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,75	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	99,88	Persentase	99,96	100,08%
		Persentase Keputusan hasil pengawasan sarana peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentifikasi penyebabnya	75,00	Persentase	76,19	101,59%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran sesuai perencanaan	14,00	Persentase	25,00	178,57%
		Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	93,00	Persentase	95,47	102,66%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	72,00	Persentase	72,70	100,97%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100,00	Persentase	92,00	92,00%
1.10	Pengawasan Produksi Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	3,52	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	93,45	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi sesuai standar	82,00	Persentase	60,66	73,98%
		Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya	52,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan	85,00	Persentase	88,89	104,58%
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	86,00	Persentase	86,36	100,42%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase Penilaian Hasil Pengawasan Kemandirian UPT Baru	75,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	78,00	Persentase	74,00	94,87%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	84,00	Persentase	69,44	82,67%
		Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Obat & NPP	100,00	Persentase	100,00	100,00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Pangan Olahan	96,60	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	92,00	Persentase	85,38	92,80%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
1.12	Registrasi Obat	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat	3,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat	91,50	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan	75,00	Persentase	93,08	124,11%
		Persentase obat yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	75,00	Persentase	95,23	126,97%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase pengawalan hilirisasi obat pengembangan baru melalui registrasi yang dikawal sesuai standar	50,00	Persentase	33,33	66,66%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat	100,00	Persentase	95,00	95,00%
1.13	Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,01	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,50	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	90,08	Persentase	90,50	100,47%
		Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	50,00	Persentase	45,91	91,82%
		Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	94,00	Persentase	92,98	98,91%
		Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	72,50	Persentase	73,23	101,01%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	90,00	Persentase	92,39	102,66%
		Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	65,00	Persentase	75,92	116,80%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100,00	Persentase	100,00	100,00%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2,90	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
1.14	Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100,00	Persentase	80,00	80,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100,00	Persentase	100,00	100,00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86,43	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3,20	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan	1,00	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90,08	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai tahapan	88,00	Persentase	80,00	90,91%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100,00	Persentase	55,00	55,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100,00	Persentase	95,00	95,00%
1.16	Standardisasi Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,43	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4,60	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	92,38	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase Standar Obat, NPPZA yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100,00	Persentase	59,38	59,38%
		Tingkat efisensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	100,00	Persentase	95,00	95,00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,60	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,30	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74,00	Persentase	60,00	81,08%
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	14,20	Persentase	70% (Progress)	
		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	5,45	Persentase	3,11	57,06%
		Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	80,00	Persentase	75,00	93,75%
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	86,42	Persentase	89,36	103,40%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100,00	Persentase	95,00	95,00%
1.18	Pengujian Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	2,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi	4,40	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,40	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi	4,40	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	4,00	Laboratorium	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	85,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	77,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	4,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	75,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91,59	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89,37	Nilai	89,87	100,56%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,21	Nilai	82,77	104,49%
		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	68,50	Nilai	68,97	100,69%
		Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	90,10	Nilai	90,88	100,87%
		Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100,00	Persentase	47,49	47,49%
		Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	30,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	98,00	Persentase	99,31	101,34%
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91	Persentase	78,95	97,58%
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	72,38	Persentase	72,38	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	42,30	Persentase	10,50	24,82%
		Persentase pemenuhan laboratorium hijau	40,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diuji sesuai standar	91,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	90,00	Persentase	99,54	110,60%
		Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99,00	Persentase	100,00	101,01%
		Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04	Presentase	78,32	97,85%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	2,80	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	87,44	Nilai	99,75	114,08%
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	59,00	Persentase	67,08	113,69%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Sesuai Standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	55,00	Persentase	75,00	136,36%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	100,00	Tingkat	100,00	100,00%
1..20	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,01	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pembangunan ZI Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,50	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT SK Kos	Persentase Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dimanfaatkan	87,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	91,00	Persentase	91,98	101,08%
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat PMPU OT, SK, Kos	2,85	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat PMPU OT, SK, Kos	87,10	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	70,00	Persentase	46,43	66,33%
		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	2,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	2,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	65,00	Persentase	40,91	62,94%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat PMPU OT, SK, Kos	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	92,00	Persentase	51,00	55,43%
		Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,34	Persentase	89,35	100,01%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	100,00	Persentase	95,00	95,00%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan	3,01	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Siber Obat dan Makanan	82,50	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	82,00	Persentase	81,63	99,55%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	87,00	Persentase	89,53	102,91%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	100,00	Persentase	95,00	95,00%
B.	**Program Dukungan**	Indeks Manajemen Risiko Sekretariat Utama	2,91	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Opini Publik	78,25	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	33,80	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Sekretariat Utama	86,62	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nlai AKIP Sekretariat Utama	83,81	Nlai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kerja Sama yang Efektif	90,50	Persentase	73,73	81,47%
		Persentase UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	86,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Indeks Kepuasan Media	78,40	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	2,92	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	81,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti	20,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,50	Persentase	74,86	82,72%
		Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media	97,25	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	90,50	Persentase	72,60	80,22%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	100,00	Persentase	100,00	100,00%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan Penyusunan Dokumen Anggaran Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	3,60	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Perencanaan Pembangunan	97,55	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	61,70	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	90,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	96,40	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	88,32	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4,00	Nilai	4,00	100,00%
		Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar	100,00	Persentase	75,00	75,00%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100,00	Persentase	60,00	60,00%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100,00	Persentase	81,82	81,82%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100,00	Persentase	100,00	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Advokasi Hukum serta Organisasi dan tata laksana	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	92,75	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	3,20	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,35	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Reformasi Hukum	100,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Dokumen Penataan organisasi yang dihasilkan	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,70	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	87,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organsiasi	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	94,15	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Tindak Lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5,00	Nilai	5,00	100,00%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,33	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Biro Sumber Daya Manusia	3,70	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Indeks NSPK Manajemen ASN	93,50	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Sistem Merit	0,97	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Biro Sumber Daya Manusia	87,76	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Sumber Daya Manusia sesuai standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase SDM BPOM yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	90,00	Persentase	55,62	61,80%
		Persentase SDM BPOM Yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Talenta BPOM yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal	20,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia	100,00	Persentase	100,00	100,00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur BPOM	Indeks BerAKHLAK	65,00	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko PPSDM	3,05	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pelayanan Publik PPSDM POM	4,05	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai AKIP PPSDM	80,15	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI PPSDM	88,50	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya sesuai dengan perencanaan	70,00	Persentase	73,11	104,44%
		Persentase SDM Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Memenuhi Standar Kompetensi	88,00	Persentase	92,45	105,06%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,61	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks SPBE	4,59	Indeks	4,57	99,56%
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5,00	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,64	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,20	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89,12	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	82,80	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62,86	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100,00	Persentase	100,00	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100,00	Persentase	72,73	72,73%
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100,00	Persentase	91,67	91,67%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92,13	Persentase	95,76	103,94%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100,00	Persentase	100,00	100,00%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Indekskepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,33	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,24	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,20	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86,08	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	82,80	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62,86	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100,00	Persentase	100,00	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan			
			Target 2025	Satuan	Realisasi s.d TW III 2025	Capaian (%)
		Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100,00	Persentase	72,73	72,73%
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100,00	Persentase	100,00	100,00%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan Assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93,26	Persentase	95,12	101,99%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100,00	Persentase	100,00	100,00%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Indeks Manajemen Risiko Biro Umum	2,65	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Aset	3,31	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	88,30	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun
		Nilai Pembangunan ZI Biro Umum	83,50	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun
		Persentase Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	94,10	Persentase	97,93	104,07%
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar	100,00	Persentase	82,00	82,00%
		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai perencanaan	100,00	Persentase	86,67	86,67%
		PersentasePenggunaan Produk Dalam Negeri	62,00	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Digitalisasi Arsip	98,28	Persentase	Akhir tahun	Akhir tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100,00	Persentase	100,00	100,00%



LAMPIRAN 2

BADAN POM

Peringkat Realisasi Anggaran Unit Kerja Pusat

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjusment
1	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	24.161.769.000	19.778.981.000	18.267.133.685	75,60%	92,36%
2	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	6.972.164.000	2.271.507.000	2.094.506.895	30,04%	92,21%
3	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	105.474.877.000	39.633.064.000	32.706.385.899	31,01%	82,52%
4	INSPEKTORAT II	5.453.149.000	1.061.223.000	864.678.837	15,86%	81,48%
5	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	39.454.115.000	15.163.126.000	12.143.512.337	30,78%	80,09%
6	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	9.794.842.000	2.545.943.000	1.994.979.556	20,37%	78,36%
7	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN. DAN KOSMETIK	11.452.098.000	4.027.896.000	3.137.375.441	27,40%	77,89%
8	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	10.719.500.000	2.613.149.000	2.028.963.254	18,93%	77,64%
9	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	6.725.908.000	1.348.878.000	1.047.244.236	15,57%	77,64%
10	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	609.796.194.000	602.195.876.000	458.325.719.881	75,16%	76,11%
11	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	8.405.176.000	2.566.820.000	1.932.291.186	22,99%	75,28%
12	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	15.895.858.000	2.594.000.000	1.924.201.492	12,11%	74,18%
13	BIRO KERJASAMA	12.828.245.000	3.555.790.000	2.634.811.873	20,54%	74,10%
14	INSPEKTORAT I	15.605.847.000	10.068.265.000	7.450.745.949	47,74%	74,00%
15	BALAI KALIBRASI	5.157.742.000	2.704.381.000	1.985.185.240	38,49%	73,41%
16	BIRO UMUM	131.078.471.000	76.568.422.000	55.853.308.830	42,61%	72,95%
17	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	13.108.632.000	5.202.334.000	3.750.672.601	28,61%	72,10%
18	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	45.468.340.000	28.415.528.000	20.021.152.519	44,03%	70,46%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjusment
19	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	4.994.107.000	3.894.100.000	2.740.501.770	54,87%	70,38%
20	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	14.933.790.000	3.143.956.000	2.200.857.343	14,74%	70,00%
21	BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI	6.868.143.000	3.711.212.000	2.590.311.600	37,71%	69,80%
22	DIT. REGISTRASI OBAT	12.814.381.000	3.075.405.000	2.144.476.526	16,73%	69,73%
23	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	10.740.240.000	2.509.343.000	1.747.162.353	16,27%	69,63%
24	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	17.367.797.000	4.961.317.000	3.356.310.121	19,32%	67,65%
25	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN. MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	12.290.695.000	2.903.165.000	1.949.681.726	15,86%	67,16%
26	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	20.041.240.000	4.893.435.000	3.186.658.431	15,90%	65,12%
27	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	14.315.118.000	3.484.200.000	2.241.231.621	15,66%	64,33%
28	DIT. STANDARDISASI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	8.727.926.000	3.698.245.000	2.335.340.034	26,76%	63,15%
29	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	14.212.277.000	3.731.448.000	2.327.665.045	16,38%	62,38%
30	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	6.238.227.000	2.804.366.000	1.711.633.640	27,44%	61,03%
31	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.231.631.000	2.250.350.000	1.330.938.012	18,40%	59,14%
32	DIT. CEGAH TANGKAL	9.582.898.000	2.167.342.000	1.212.909.793	12,66%	55,96%
33	BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN	15.349.580.000	10.451.953.000	2.799.971.176	18,24%	26,79%

Peringkat Realisasi Anggaran Balai Besar/Balai POM

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjusment
1	BALAI POM DI ENDE	12.265.395.000	8.873.658.000	7.599.637.091	61,96%	85,64%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	35.352.349.000	28.008.226.000	23.140.483.478	65,46%	82,62%
3	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	21.741.332.000	17.367.693.000	14.344.843.164	65,98%	82,59%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	31.859.496.000	21.489.875.000	17.729.809.697	55,65%	82,50%
5	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	8.393.822.000	6.713.496.000	5.531.031.810	65,89%	82,39%
6	BALAI POM DI KEDIRI	17.813.808.000	9.077.964.000	7.451.820.286	41,83%	82,09%
7	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	21.602.958.000	16.489.117.000	13.519.960.658	62,58%	81,99%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	37.732.958.000	29.621.612.000	24.190.932.040	64,11%	81,67%
9	BALAI POM DI TANGERANG	11.435.646.000	9.526.515.000	7.776.142.786	68,00%	81,63%
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	29.536.439.000	19.938.563.000	16.049.981.782	54,34%	80,50%
11	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	37.073.893.000	16.573.751.000	13.313.444.892	35,91%	80,33%
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	27.969.254.000	22.013.685.000	17.574.117.756	62,83%	79,83%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	21.587.291.000	16.688.483.000	13.194.594.030	61,12%	79,06%
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	32.737.519.000	24.143.801.000	18.853.078.929	57,59%	78,09%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	20.670.330.000	17.075.617.000	13.330.048.872	64,49%	78,06%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	65.287.804.000	40.296.651.000	31.350.874.962	48,02%	77,80%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	28.916.562.000	21.109.192.000	16.376.560.374	56,63%	77,58%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjusment
18	BALAI BESAR POM DI KUPANG	32.785.794.000	20.326.832.000	15.762.628.302	48,08%	77,55%
19	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	23.732.896.000	14.817.262.000	11.489.419.903	48,41%	77,54%
20	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	24.006.202.000	18.539.539.000	14.270.268.794	59,44%	76,97%
21	BALAI POM DI JEMBER	7.829.237.000	5.861.656.000	4.496.652.973	57,43%	76,71%
22	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	22.344.341.000	17.610.660.000	13.484.047.774	60,35%	76,57%
23	BALAI POM DI TANJUNGBALAI	3.789.356.000	2.778.521.000	2.125.865.299	56,10%	76,51%
24	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	45.007.401.000	29.019.779.000	22.160.090.842	49,24%	76,36%
25	BALAI POM DI TASIKMALAYA	7.950.198.000	6.146.764.000	4.671.277.906	58,76%	76,00%
26	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	48.202.735.000	29.768.752.000	22.426.458.895	46,53%	75,34%
27	BALAI POM DI BANYUMAS	8.259.601.000	3.774.585.000	2.838.178.809	34,36%	75,19%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	11.903.732.000	8.633.325.000	6.464.279.134	54,30%	74,88%
29	BALAI POM DI PALOPO	6.795.800.000	5.429.353.000	4.044.181.589	59,51%	74,49%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	29.088.195.000	15.500.157.000	11.461.006.888	48,02%	73,94%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	25.536.067.000	15.726.495.000	11.545.710.516	45,21%	73,42%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	19.026.263.000	11.053.641.000	8.104.834.318	42,60%	73,32%
33	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	35.969.581.000	26.527.389.000	19.328.075.584	53,73%	72,86%
34	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	66.709.935.000	37.205.305.000	27.063.403.906	40,57%	72,74%
35	BALAI POM DI BALIKPAPAN	5.034.371.000	3.088.276.000	2.229.899.944	44,29%	72,21%
36	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	19.936.291.000	15.842.597.000	11.438.453.503	57,38%	72,20%

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjusment
37	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	53.693.128.000	31.429.448.000	22.684.504.875	42,25%	72,18%
38	BALAI POM DI TABALONG	3.701.940.000	2.828.739.000	2.023.424.362	54,66%	71,53%
39	BALAI POM DI INDRAGIRI HULU	15.866.513.000	3.450.005.000	2.443.120.144	15,40%	70,81%
40	BALAI POM DI SANGGAU	4.427.160.000	3.077.656.000	2.174.136.359	49,11%	70,64%
41	BALAI POM DI BAU-BAU	4.695.453.000	3.581.870.000	2.494.834.735	53,13%	69,65%
42	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	13.896.643.000	8.092.560.000	5.629.105.719	40,51%	69,56%
43	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	25.220.587.000	17.663.235.000	12.271.557.673	48,66%	69,48%
44	BALAI POM DI BIMA	4.075.427.000	2.989.660.000	2.060.276.034	50,55%	68,91%
45	BALAI POM DI SURAKARTA	8.516.391.000	5.809.625.000	3.961.646.324	46,52%	68,19%
46	BALAI POM DI TULANG BAWANG	4.567.426.000	2.710.861.000	1.831.189.369	40,09%	67,55%
47	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	14.824.923.000	11.093.071.000	7.443.150.991	50,21%	67,10%
48	BALAI POM DI DUMAI	15.963.358.000	3.882.835.000	2.580.993.388	16,17%	66,47%
49	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	36.480.145.000	23.936.131.000	15.588.448.560	42,73%	65,13%
50	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	30.183.699.000	22.684.926.000	14.773.234.215	48,94%	65,12%
51	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	30.667.300.000	26.055.522.000	14.735.793.267	48,05%	56,56%
52	BALAI POM DI BOGOR	10.045.362.000	8.927.779.000	4.628.824.870	46,08%	51,85%
53	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	28.668.758.000	19.493.485.000	8.306.700.077	28,97%	42,61%

Peringkat Realisasi Anggaran Loka POM

No	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjusment
1	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	3.653.552.000	2.730.041.000	2.061.802.695	56,43%	75,52%
2	LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO	3.739.713.000	2.839.571.000	2.128.880.073	56,93%	74,97%
3	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	4.325.518.000	2.810.882.000	2.102.303.942	48,60%	74,79%
4	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	4.439.464.000	3.430.997.000	2.516.718.537	56,69%	73,35%
5	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	3.991.146.000	2.899.701.000	2.119.955.195	53,12%	73,11%
6	LOKA POM DI ACEH SELATAN	3.669.645.000	2.771.438.000	2.012.489.670	54,84%	72,62%
7	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	3.457.179.000	2.416.595.000	1.750.358.478	50,63%	72,43%
8	LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG	3.463.056.000	2.607.135.000	1.885.197.759	54,44%	72,31%
9	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	3.957.995.000	2.637.569.000	1.898.455.736	47,97%	71,98%
10	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	4.349.489.000	3.301.033.000	2.375.707.678	54,62%	71,97%
11	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	3.956.386.000	2.816.057.000	1.973.072.636	49,87%	70,07%
12	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	3.688.411.000	2.749.580.000	1.926.011.724	52,22%	70,05%
13	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	3.622.695.000	2.682.121.000	1.877.883.958	51,84%	70,01%
14	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	3.682.388.000	2.721.846.000	1.896.772.692	51,51%	69,69%
15	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	4.039.332.000	2.899.232.000	1.976.957.443	48,94%	68,19%
16	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.722.970.000	2.609.376.000	1.777.467.709	47,74%	68,12%
17	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	9.066.425.000	4.082.753.000	2.752.803.790	30,36%	67,43%
18	LOKA POM DI ACEH TENGAH	9.338.179.000	3.033.015.000	2.041.495.860	21,86%	67,31%
19	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	3.879.098.000	2.886.057.000	1.934.707.497	49,88%	67,04%
20	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	12.253.060.000	3.094.742.000	1.994.153.803	16,27%	64,44%



Halo BPOM : 1200533

website : www.pom.go.id

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560, Indonesia